

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 309 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CICALENGKA
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CICALENGKA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah atau yang disebut dengan Bapperida adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Kecamatan Cicalengka untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Kecamatan Cicalengka untuk periode 1 (satu) tahunan.

15. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu Perangkat Daerah, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.

BAB II
RUANG LINGKUP
RENSTRA KECAMATAN CICALENGKA

Pasal 2

Dokumen Renstra Kecamatan Cicalengka merupakan dokumen perencanaan strategis Kecamatan Cicalengka untuk periode 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Cicalengka yang memuat tujuan, sasaran, indikator, target kinerja, strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Cicalengka yang berpedoman pada RPJMD tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Renstra Kecamatan Cicalengka bertujuan untuk:

a. menjaga kesinambungan serta konsistensi pelaksanaan pembangunan dengan visi misi RPJMD dan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Cicalengka dalam kerangka waktu sesuai kapasitas Kecamatan Cicalengka dalam implementasinya;
b. menerjemahkan arah dan kebijakan Pemerintah Daerah terkait perkembangan pelayanan Kecamatan Cicalengka agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat;
c. memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan Kecamatan Cicalengka;
d. menyediakan dasar *(benchmark)* untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Cicalengka;
e. merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan; dan
f. membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Kecamatan Cicalengka.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA KECAMATAN CICALENGKA

Pasal 4

(1) Renstra Kecamatan Cicalengka Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Kecamatan Cicalengka dalam menyusun Renja Kecamatan Cicalengka.

(2) Renstra Kecamatan Cicalengka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. bab I pendahuluan paling sedikit memuat:
   1. latar Belakang;
   2. dasar hukum penyusunan;
   3. maksud dan tujuan; dan
   4. sistematika penulisan.

b. bab II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Kecamatan Cicalengka paling sedikit memuat:
   1. gambaran pelayanan Kecamatan Cicalengka; dan
   2. permasalahan dan isu strategis Kecamatan Cicalengka.

c. bab III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan paling sedikit memuat:
   1. tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Cicalengka Tahun 2025-2029;
   2. strategi Kecamatan Cicalengka dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029; dan
   3. arah kebijakan Kecamatan Cicalengka dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029.

d. bab IV program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan paling sedikit memuat:
   1. uraian program, kegiatan, subkegiatan, beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
   2. uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
   3. target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama Kecamatan Cicalengka; dan

4. target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci.

e. Bab V penutup paling sedikit memuat:
   1. kesimpulan;
   2. kaidah pelaksanaan; dan
   3. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

(3) Dokumen Renstra Kecamatan Cicalengka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA KECAMATAN CICALENGKA

Pasal 5

(1) Kecamatan Cicalengka melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Cicalengka dan evaluasi hasil Renstra Kecamatan Cicalengka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapperida.

(2) Bapperida melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan Kecamatan Cicalengka terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Kecamatan Cicalengka.

(3) Camat Cicalengka menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renstra Kecamatan Cicalengka.

(4) Format pengendalian dan evaluasi serta verifikasi sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN CICALENGKA

Pasal 6

Perubahan Renstra Kecamatan Cicalengka dapat dilakukan apabila :

a. perubahan Renstra Kecamatan Cicalengka mempedomani perubahan RPJMD;
b. perubahan Renstra Kecamatan Cicalengka dilakukan sekurang kurangnya adanya perubahan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan; dan
c. apabila terdapat perubahan kelembagaan Kecamatan Cicalengka, maka Renstra Kecamatan Cicalengka dapat dilakukan perubahan dengan tetap mempedomani program, indikator program dan pendanaan indikatif dalam RPJMD.

Pasal 7

Perubahan Renstra Kecamatan Cicalengka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) Indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Renstra Kecamatan Cicalengka Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
(2) Dalam hal pelaksanaan Renstra Kecamatan Cicalengka terjadi perubahan target capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah indikator sasaran pembangunan jangka menengah, perubahan dapat dilakukan dalam Renja Kecamatan Cicalengka.
(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.

(4) Kerangka Pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini merupakan angka yang bersifat indikatif, yang akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 309

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 309 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CICALENGKA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CICALENGKA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CICALENGKA TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CICALENGKA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Bandung Nomor 120 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, maka tugas pokok Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang tersebut secara efektif dan efisien, diperlukan adanya dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik tahunan maupun jangka menengah, yang diwujudkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Dokumen perencanaan perangkat daerah ini merupakan turunan (*breakdown*) dari dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung.

Selanjutnya, penyusunan Renstra ini juga menindaklanjuti Pasal 65 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa salah satu kewajiban kepala daerah adalah menyusun dan menetapkan RPJMD. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045, yang mengamanatkan bahwa RPJMD harus disusun selaras dengan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan arah pembangunan nasional.

Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 menegaskan pentingnya integrasi antara perencanaan pembangunan pusat dan daerah. RPJMN 2025–2029 memuat misi pembangunan nasional yang dikenal dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yang menjadi pedoman strategis dalam merumuskan RPJMD. Sejalan dengan itu, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 mengatur bahwa RPJMD wajib disusun sebagai penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD serta RPJMN.

Dalam konteks tersebut, Renstra Kecamatan Cicalengka periode 2025–2029 merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bandung yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, khususnya pasal 16 ayat (2) disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Selain itu penyusunan Renstra Kecamatan Cicakengka Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 ini juga berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra Kecamatan Cicalengka memiliki peran strategis sebagai:

1. Dokumen Perencanaan sebagai acuan dalam merumuskan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian visi-misi daerah.
2. Instrumen Pengendalian dan Evaluasi menjadi tolok ukur untuk mengukur kinerja pembangunan di tingkat kecamatan.
3. Media Akuntabilitas Publik sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Agar pelaksanaannya optimal, penyusunan Renstra dilakukan dengan tiga pendekatan utama:

1. Pendekatan Komprehensif: memperhatikan aspek sosial, ekonomi, lingkungan, tata ruang, budaya, dan kelembagaan secara menyeluruh.
2. Pendekatan Terintegrasi: menyinergikan program lintas sektor serta memastikan keterpaduan antar-tingkatan pemerintahan.
3. Pendekatan Partisipatif: melibatkan masyarakat, tokoh lokal, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses perencanaan.

Dengan demikian, penyusunan Renstra Kecamatan Cicalengka 2025–2029 diharapkan dapat menghadirkan arah pembangunan yang inklusif, partisipatif, akuntabel, berkelanjutan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Renstra ini bukan hanya sekadar dokumen administratif, tetapi juga merupakan komitmen bersama untuk menjadikan Kecamatan Cicalengka lebih maju, kompetitif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sejalan dengan semangat otonomi daerah dan kearifan lokal.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum Penyusunan Renstra Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 Adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187); 13
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang 14 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 100);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121);
19. Peraturan Bupati Bandung Nomor 90 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
20. Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/KEP.769-TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai pedoman strategis bagi perangkat daerah kecamatan dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan jangka menengah selama lima tahun ke depan. Renstra ini disusun untuk:

1. Mengintegrasikan visi dan misi Kepala Daerah terpilih dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat, sehingga pembangunan di Kecamatan Cicalengka dapat berjalan selaras dengan arah pembangunan daerah, provinsi, maupun nasional.
2. Menjabarkan sasaran strategis dalam RPJMD Kabupaten Bandung ke dalam program dan kegiatan jangka menengah di tingkat kecamatan yang lebih terukur, terarah, dan operasional.
3. Menjadi tindak lanjut dari evaluasi RPJMD sebelumnya, sehingga mampu memperbaiki kelemahan, mengoptimalkan

capaian, serta menghadirkan inovasi pembangunan berbasis potensi lokal.

4. Menjadi landasan bagi penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Renja Kecamatan) agar lebih fokus, sistematis, dan berkesinambungan.
5. Memastikan bahwa pembangunan di Kecamatan Cicalengka berlangsung dengan pendekatan holistik, tematik, integratif, dan berbasis spasial, sesuai amanat regulasi perencanaan pembangunan nasional maupun daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 adalah untuk:

1. Menyediakan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang sesuai dengan dinamika kondisi wilayah serta sejalan dengan kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Bandung.
2. Menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Kecamatan Cicalengka, sehingga program dan kegiatan dapat terarah, terukur, dan berkesinambungan.
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang selaras, terpadu, dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten, serta memperhatikan keterkaitan dengan wilayah sekitar.
4. Mengoptimalkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, melalui perencanaan berbasis kinerja, transparan, dan akuntabel.
5. Mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Cicalengka melalui pembangunan yang inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECMATAN CICALENGKA

2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Cicalengka

2.1.1. Tugas, Fugsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Cicalengka

2.1.2. Kinerja Pelayanan Kecamatan Cicalengka

2.1.3. Kelompok Sasaran Layanan

2.1.4. Mitra Kecamatan dalam Memberikan Layanan

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Penelaahan RPJMN 2025-2029

2.2.2. Penelaahan RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029

2.2.3. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung

2.2.4. Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung

2.2.5. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Cicalengka

2.2.6. Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

3.1.1. Tujuan

3.1.2. Sasaran

3.2. Strategi Kecamatan Cicalengka dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025–2029

3.3. Penyajian Lokus Kecamatan Cicalengka

3.4. Arah Kebijakan Kecamatan Cicalengka dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025–2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

4.2. Rumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Cicalengka

4.3. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui IKU PD

4.4. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025 2029 melalui IKK

4.5. Uraian Indikator dan Target Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

4.6. Uraian Indikator dan Target Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

4.7. Dukungan Terhadap Tematik Pembangunan Tahun 2025-2029

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

5.2. Kaidah Pelaksanaan

5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN CICALENGKA

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Cicalengka

Kecamatan Cicalengka merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bandung yang memiliki peran strategis sebagai pusat pelayanan masyarakat pada tingkat wilayah. Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan sebagian kewenangan Bupati, kecamatan menjadi ujung tombak dalam memberikan pelayanan publik, baik yang bersifat administratif maupun teknis kepada masyarakat. Gambaran pelayanan ini disusun untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai kondisi pelayanan saat ini, tantangan yang dihadapi, serta potensi pengembangannya di masa mendatang.

Pelayanan Kecamatan Cicalengka mencakup layanan administrasi, sosial, perizinan, ketertiban, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan upaya penguatan yang sistematis, pelayanan Kecamatan Cicalengka dapat semakin responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

2.1.1 Tugas, fungsi, dan struktur Kecamatan Cicalengka

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Bandung Nomor 90 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, Kecamatan dipimpin oleh Camat. Camat memiliki tugas pokok memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan tugas umum pemerintahan serta melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Adapun fungsi Camat Adalah sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Camat menyelenggarakan fungsi: Perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan kebijakan umum serta teknis operasional di bidang pemerintahan,

pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, pembangunan, serta sosial budaya;

2. Penyelenggaraan, pengendalian, dan fasilitasi pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, pembangunan, serta sosial budaya;
3. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan capaian kinerja Kecamatan.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Camat menyelenggarakan berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan, antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
6. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Struktur Kecamatan Cicalengka terdiri atas Sekretariat dan beberapa Seksi, yang masing-masing dipimpin oleh pejabat struktural sesuai bidangnya. Adapun uraian tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris Kecamatan

   Mempunyai tugas pokok merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi pelayanan perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan, evaluasi, serta pelaporan. Adapun Fungsi Sekretaris Kecamatan Adalah :

   a. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
   b. Pengumpulan dan pengolahan usulan program dan kegiatan;
   c. Penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
   d. Pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan;

e. Penyelenggaraan serta pengkoordinasian Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
f. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai lingkup tugasnya;
g. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan capaian kinerja Sekretariat.

2. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

Tugas pokok: menyusun dan melaksanakan rencana dan program serta pengelolaan administrasi keuangan. Adapun fungsi Kepala Subb Bagian Program dan Keuangan Adalah :

a. Penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan sesuai hasil Musrenbang, visi dan misi, serta Renstra Daerah;
b. Koordinasi dengan Subbagian dan Seksi dalam penyusunan serta penetapan rencana kerja Kecamatan;
c. Koordinasi dengan Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam penyusunan tugas dan fungsi Kecamatan;
d. Penyusunan rencana kerja operasional pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan Kecamatan;
e. Pengelolaan administrasi serta pertanggungjawaban keuangan Kecamatan;
f. Penyusunan laporan pengelolaan keuangan Kecamatan; Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi program dan keuangan Kecamatan;
g. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Program dan Keuangan.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas pokok: menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan umum, surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, barang milik daerah/aset, rumah tangga, serta administrasi dan pembinaan kepegawaian. Adapun Fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Adalah :

a. Penyusunan bahan pelayanan umum, kepegawaian, kelembagaan, dan ketatalaksanaan;

b. Koordinasi dengan Subbagian dan Seksi terkait penyusunan serta penetapan tugas dan fungsi Kecamatan;
c. Penyelenggaraan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, barang milik daerah/aset, rumah tangga, dan administrasi kepegawaian;
d. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai lingkup tugasnya;
e. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
g. Tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

4. Kepala Seksi Pemerintahan

Tugas pokok: menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun, serta melaksanakan rencana kerja Seksi Pemerintahan. Adapun fungsi epala Seksi Pemerintahan Adalah :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional bidang pemerintahan;
b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemerintahan;
c. Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai lingkup tugasnya;
d. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemerintahan.

5. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Tugas pokok: menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun, serta melaksanakan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat. Adapun fungsi Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Adalah :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional bidang pemberdayaan masyarakat;
b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
c. Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai lingkup tugasnya;

d. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

6. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

   Tugas pokok: menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun, serta melaksanakan rencana kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Adapun fungsi Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Adalah :

   a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
   b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
   c. Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai lingkup tugasnya;
   d. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan capaian kinerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

7. Kepala Seksi Pembangunan

   Tugas pokok: menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun, serta melaksanakan rencana kerja Seksi Pembangunan. Adapaun Fungsi Kepala Seksi Pembangunan adalah :

   a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional bidang pembangunan;
   b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pembangunan;
   c. Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai lingkup tugasnya;
   d. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pembangunan.

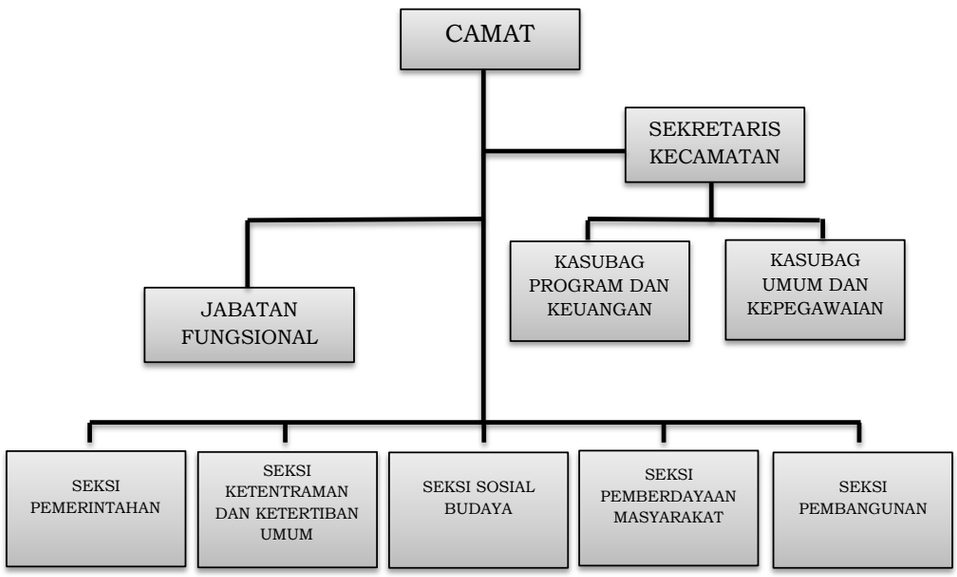
8. Kepala Seksi Sosial Budaya

   Tugas pokok: menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun, serta melaksanakan rencana kerja Seksi Sosial Budaya. Adapun fungsi Kepala Seksi Sosial Budaya adalah :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional bidang sosial budaya;
b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Sosial Budaya;
c. Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai lingkup tugasnya;

   Monitoring, evaluasi, dan pelaporan capaian kinerja Seksi Sosial Budaya.

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Cicalengka



Sumber : Peraturan Bupati Bandung Nomor 39 Tahun 2025

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Cicalengka

2.1.2.1 Sumber Daya Aparatur/Pegawai Perangka Daerah

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung pada tahun 2025 memiliki pegawai sebanyak 26 orang. Jumlah pegawai eselon III sebanyak 2 orang yaitu Camat dan Sekretaris Kecamatan, Eselon IV sebanyak 7 orang yaitu para kepala seksi dan kepala sub bagian, Jabatan Fungsional 1 orang, Pelaksana sebanyak 10 orang dan tenaga Pekerja Harian Lepas (PHL) 6 orang. Rincian pegawai berdasarkan Eselon Jabatan dan Unit Kerja di lingkungan Kecamatan Cicalengka, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Esselon	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai	%
		L	P		
1	II b	0	0	0	0%
2	III a	1	0	1	4%
3	III b	1	0	1	4%
4	IV a	3	2	5	19%
5	IV b	0	2	2	8%
6	-	13	4	17	65%
Total		18	8	26	100%

Sumber : Sekretariat Kecamatan Cicalengka Bulan Agustus Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 2.1 mengenai kondisi kepegawaian Kecamatan Cicalengka tahun 2025, diketahui bahwa jumlah pegawai secara keseluruhan adalah 26 orang, dengan komposisi 18 orang laki-laki dan 8 orang perempuan. Dari jumlah tersebut, sebagian besar pegawai (65%) berada pada jabatan non-eselon dengan total 17 orang, terdiri dari 13 laki-laki dan 4 perempuan.

Untuk jabatan struktural, pegawai pada eselon III a dan III b masing-masing berjumlah 1 orang (4%), seluruhnya laki-laki. Pada eselon IV a terdapat 5 orang pegawai atau 19% dari total pegawai, terdiri atas 3 laki-laki dan 2 perempuan. Sementara itu, eselon IV b diisi oleh 2 orang pegawai seluruhnya perempuan, dengan persentase sebesar 8%. Adapun jabatan eselon II b tidak terdapat pegawai yang mendudukinya.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Kecamatan Cicalengka Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No	Pendidikan	ASN	Non ASN	Jenis Kelamin		Jumlah
				L	P	
1	SD	0	0	0	0	0
2	SMP	0	2	2	0	2
3	SMA	5	2	7	0	7
4	D3	2	0	1	1	2
5	S1	8	2	5	5	10
6	S2	5	0	3	2	5
Jumlah		20	6	18	8	26

Sumber : Sekretariat Kecamatan Cicalengka Bulan Agustus Tahun 2025

Tabel 2.2 menunjukkan, Pegawai Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung berdasarkan tingkat pendidikan terdiri atas: SD sebesar 0%, SMP sebesar 8%, SMA sebesar 27%, D3 sebesar 8%, S1 sebesar 38% dan S2 sebesar 19%. Kecamatan Cicalengka sebagai lembaga teknis daerah, secara pendidikan formal telah memadai, hanya saja kapasitas sumber daya manusia terkait dengan perencanaan perlu ditingkatkan melalui diklat teknis perencanaan.

Tabel 2.3
Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Kecamatan Cicalengka
berdasarkan Diklat Struktural/Pimpinan Tahun 2025

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Diklatpim II			0
2	Diklatpim III	1		1
3	Diklatpim IV	2	3	6
JUMLAH				7

Sumber : Kepegawaian Kecamatan Cicalengka Agustus 2025

2.1.2.2 Sumber Daya Aset/BMD

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya,Kecamatan Cicalengka dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan kantor, kendaraan, inventaris, dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi kurang baik/rusak. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari Berita Acara Rekonsiliasi Aset Periode 01 Januari s/d 31 Desember 2024 Kecamatan Cicalengka sebagai berikut :

Tabel 2.4
Hasil Rekonsiliasi Aset Kecamatan Cicalengka Tahun 2024

No	Jenis Aset	Saldo Akhir Per 31 Desember 2023	Akumulasi Penyusutan s/d 31 Desember 2024	Nilai Buku Per 31 Desember 2024
1	Tanah	1.672.819.200	-	1.672.819.200
2	Peralatan dan Mesin	1.549.951.207	1.356.172.867	193.778.340

No	Jenis Aset	Saldo Akhir Per 31 Desember 2023	Akumulasi Penyusutan s/d 31 Desember 2024	Nilai Buku Per 31 Desember 2024
3	Gedung dan Bangunan	3.362.356.875	1.132.314.248	2.230.042.627
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	101.171.000	19.395.598	81.775.402
5	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
6	Kontruksi dalam pengerjaan	-	-	-
7.	Aset Tak Berwujud	-	-	-
8	Aset Lain-lain/Rusak Berat	177.054.209	172.404.209	4.650.000
9	Aset yang dimanfaatkan	-	-	-
Total		6.863.352.491	2.680.286.922	4.183.065.569

Sumber : Sekretariat Kecamatan Cicalengka, 2024

Berdasarkan Tabel 2.4, total nilai aset yang dimiliki Kecamatan Cicalengka per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp6.863.352.491. Setelah dilakukan perhitungan akumulasi penyusutan hingga akhir tahun 2024 sebesar Rp2.680.286.922, maka nilai buku aset pada 31 Desember 2024 menjadi Rp4.183.065.569.

Jika dirinci, aset terbesar berasal dari gedung dan bangunan dengan nilai buku sebesar Rp2.230.042.627 setelah penyusutan, dari saldo awal Rp3.362.356.875. Selanjutnya, tanah tercatat sebesar Rp1.672.819.200 yang tidak mengalami penyusutan. Aset berupa peralatan dan mesin memiliki saldo awal Rp1.549.951.207, dengan akumulasi penyusutan Rp1.356.172.867, sehingga nilai bukunya tinggal Rp193.778.340.

Sementara itu, jalan, irigasi, dan jaringan bernilai Rp101.171.000 dengan penyusutan Rp19.395.598, sehingga tersisa Rp81.775.402. Untuk aset kategori lain-lain/rusak berat, dari saldo awal Rp177.054.209, setelah penyusutan Rp172.404.209 nilai bukunya menjadi Rp4.650.000. Adapun kategori aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan, aset tak berwujud, maupun aset yang dimanfaatkan, pada tahun 2024 tidak terdapat pencatatan nilai.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa sebagian besar aset Kecamatan Cicalengka masih didominasi oleh aset tidak bergerak seperti tanah serta gedung dan bangunan, sementara aset

bergerak seperti peralatan dan mesin mengalami penurunan nilai yang signifikan akibat penyusutan.

Sedangkan persentase sarana dan prasarana dengan pengelompokan kondisi aset, selengkapnya disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Klasifikasi Aset Berdasarkan Kondisi

No.	Klasifikasi Kondisi Aset	Nilai Aset	Persentase
1	Baik	4.178.415.569,00	99,89%
2	Rusak berat	4.650.000,00	0,11%
Jumlah		4.183.065.569,00	100%

Sumber : Sekretariat Kecamatan Cicalengka Tahun 2024

Dari Tabel 2.5 Klasifikasi Aset berdasarkan Kondisi menunjukkan bahwa Barang Milik Daerah/asset dalam kondisi baik yang ada di kecamatan Cicalengka sebesar Rp 4.178.415.569,00 atau sebesar 99,89% dari total asset sebesar Rp 4.183.065.569,00

2.1.2.3 Sarana dan Pra Sarana Kecamatan Cicalengka

Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan Cicalengka memiliki berbagai sarana dan prasarana yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB). Sarana dan prasarana tersebut terbagi ke dalam beberapa kelompok KIB, yaitu KIB A (tanah), KIB B (peralatan dan mesin), KIB C (gedung dan bangunan), serta KIB D (jalan, irigasi, dan jaringan). Masing-masing kelompok memiliki fungsi dan peran yang penting dalam menunjang kegiatan operasional maupun pelayanan publik di wilayah Kecamatan Cicalengka.

Tabel 2.6
Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (Kib) A
Tanah

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Harga (ribuan Rp)
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3.700,00	1980	Jalan Dewi Sartika	643.000,00

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Harga (ribuan Rp)
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	580,00	1990	JL. RAYA CICALENGKA - GARUT	90.000,00
3	Tanah Bangunan Sarana Olah Raga Terbuka	2.462,00	2016	Kp. Cipeutag RT 001 RW 009 Ds. Tenjolaya Kec. Cicalengka	939.819,20
Jumlah Harga					1.672.819,20

Sumber : Subbag Umpeg Kecamatan Cicalengka, 2024

Tabel 2.7
Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (Kib) B
Peralatan dan Mesin

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	Harga (ribuan Rp)
1	Pompa Tangan	Handspayer /	1.650,00
2	Pompa Air	New Shimizu /	4.000,00
3	Pompa Air	Jiang Fa /	21.580,00
4	Tali Kamantel Static	LOKAL / -	450,00
5	Station Wagon	DAIHATSU /	159.081,29
6	Mini Bus (Penumpang 14 Orang	TOYOTA /	215.280,00
7	Mini Bus (Penumpang 14 Orang	Daihatsu /	119.774,67
8	Sepeda Motor	KLX / 150S	30.000,00
9	Sepeda Motor	HONDA /	16.875,00
10	Sepeda Motor	Kawasaki / KLX	34.350,00
11	Gerobak Dorong	Lokal / Lokal	3.600,00
12	Tandu dorong	LOKAL / -	3.000,00
13	perkakas bengkel listrik lainnya	Lokal / -	300,00
14	Mesin Gergaji	Daezen /	3.456,50
15	Mesin Gergaji	Stihl / MS 382	8.000,00
16	Palu	Konde RRC 2	300,00
17	Mesin Ketik Manual Standard	OLYMPIA / TDL	1.000,00
18	Mesin Absen (Time Recorder)	pingersport /	8.000,00
19	Lemari Besi/Metal	ELITE / -	4.037,55
20	Lemari Besi/Metal	ELITE / -	4.037,55
21	Lemari Besi/Metal	LION / -	3.000,00
22	Lemari Besi/Metal	BROTHER / -	6.000,00
23	Lemari Besi/Metal	Avesta / -	3.465,00
24	Lemari Besi/Metal	VIP / -	3.465,00
25	Lemari Besi/Metal	Lion / Lion	3.800,00
26	Lemari Kayu	LOKAL /	4.460,00
27	Lemari Kayu	LOKAL /	1.000,00
28	Filing Cabinet Besi	AVESTA / -	3.886,70
29	Filing Cabinet Besi	BROTHER / -	10.000,00
30	Filing Cabinet Besi	LION / -	3.960,00
31	Filing Cabinet Besi	ELITE / -	3.000,00
32	Filing Cabinet Besi	Datascrip / -	3.245,00
33	Filing Cabinet Besi	Elite / Elite	2.300,00
34	Filing Cabinet Besi	Lion / Lokal	8.755,00
35	Lemari Kaca	LION / -	3.460,00
36	Lemari Kaca	Lokal / Lokal	2.764,40
37	CCTV - Camera Control Television	HMP HISOMO /	1.000,00
38	CCTV - Camera Control Television	HMP HISOMO /	7.000,00

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	Harga (ribuan Rp)
39	Papan Visual/Papan Nama	Lokal / -	2.458,75
40	Alat Penghancur Kertas	DAIKO /	2.500,00
41	Focusing Screen/Layar LCD	SCREEN PRO /	2.000,00
42	Papan Nama Instansi	LOKAL / BESI	998,80
43	Papan Nama Instansi	Lokal / -	1.700,00
44	Alat Kantor Lainnya	LOKAL / MEJA	5.340,00
45	Alat Kantor Lainnya	ORBITAL /	5.000,00
46	Alat Kantor Lainnya	LOKAL /	2.291,70
47	Alat Kantor Lainnya	LOKAL /	3.000,00
48	Alat Kantor Lainnya	LOKAL /	10.000,00
49	Alat Kantor Lainnya	LOKAL / -	74.980,00
50	Alat Kantor Lainnya	ALPINA / JAS	900,00
51	Alat Kantor Lainnya	TERA / SEPATU	1.800,00
52	Alat Kantor Lainnya	LOKAL / MEJA	3.110,00
53	Meja Kerja Kayu	LOKAL / -	17.500,00
54	Meja Kerja Kayu	Lokal / -	3.000,00
55	Meja Kerja Kayu	Lokal / Lokal	3.740,00
56	Meja Kerja Kayu	Lokal / Lokal	12.500,00
57	Kursi Besi/Metal	INDACI / -	12.991,00
58	Kursi Besi/Metal	Indachi / -	3.960,00
59	Meja Rapat	LOKAL / MEJA	5.800,00
60	Meja Rapat	LOKAL / LOKAL	4.000,00
61	Meja Rapat	Lokal / -	10.656,00
62	Tempat Tidur Besi	Central / -	3.700,00
63	Tempat Tidur Besi	LOKAL /	3.000,00
64	Tempat Tidur Kayu	Guhdo / -	4.961,75
65	Meja Resepsionis	Lokal / -	18.981,00
66	Meja 1/2 Biro	LOKAL / -	10.000,00
67	Kursi Rapat	CHEETOS / -	302,01
68	Kursi Rapat	CHEETOS / -	8.154,24
69	Kursi Rapat	-	302,01
70	Kursi Rapat	CHEETOS / -	21.140,63
71	Kursi Tamu	LOKAL / -	1.850,00
72	Kursi Tamu	LOKAL / -	5.000,00
73	Kursi Tamu	Lokal / Lokal	2.800,00
74	Kursi Putar	Dhanka / -	8.523,48
75	Kursi Putar	DANKHA / -	7.000,00
76	Kursi Putar	DHANKA / -	1.000,00
77	Kursi Putar	Lokal / Lokal	8.000,00
78	Kursi Lipat	Vios	7.500,00
79	Kursi Lipat	Chitose / -	26.760,00
80	Meja Komputer	CRYSTAL / -	513,85
81	Meja Komputer	Lokal / -	1.500,00
82	Sofa	LOKAL / -	5.046,90
83	Sofa	Lokal / -	5.995,00
84	Sofa	Lokal / Lokal	5.000,00
85	Meubeleur lainnya	LOKAL / -	3.700,00
86	Mesin Penghisap Debu/Vacuum	SHARP /	2.500,00
87	Mesin Pemotong Rumput	Honda / Gx35	4.582,40
88	Lemari Es	SHARP / SJ	4.000,00
89	A.C. Window	MIDEA / -	9.038,10
90	A.C. Window	SHARP / -	4.499,00
91	A.C. Window	LG / T09NLA	4.500,00
92	A.C. Window	LG / T07NLA	4.000,00
93	A.C. Window	LG / T10EMV	4.500,00
94	A.C. Split	LG / T09NL	4.000,00
95	Kipas Angin	KRISBOW / -	1.000,00
96	Kompor Gas (Alat Dapur)	QUANTUM / -	592,50
97	Kompor Gas (Alat Dapur)	quantum /	850,00
98	Kompor Gas (Alat Dapur)	Rinnai /	500,00

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	Harga (ribuan Rp)
99	Rice Cooker (Alat Dapur)	LOKAL /	2.334,55
100	Rice Cooker (Alat Dapur)	yongma / -	600,00
101	Rice Cooker (Alat Dapur)	Yongma /	750,00
102	Kitchen Set	Lokal / -	7.470,50
103	Tabung Gas	LOKAL / 15 Kg	711,00
104	Tabung Gas	elpiji / 12 kg	500,00
105	Tabung Gas	Lokal / Lokal	375,00
106	Rak Piring Alumunium	SIGMA / RAK	850,00
107	Alat Dapur lainnya	LOKAL / buleng	1.718,30
108	Alat Dapur lainnya	LOKAL /	1.185,05
109	Alat Dapur lainnya	LOKAL /	1.718,30
110	Televisi	SHARP / 32	3.500,00
111	Televisi	LG / 42 Inchi	7.997,00
112	Televisi	LG / LM 34	5.000,00
113	Televisi	Sharp / LC 40	5.909,50
114	Loudspeaker	BMB / -	3.028,15
115	Loudspeaker	Lokal / Lokal	5.753,00
116	Sound System	BMB /	4.500,00
117	Sound System	Megavox /	9.900,00
118	Wireless	LOKAL / -	2.523,50
119	Camera Video	Kingstone / -	2.000,00
120	Tustel	NIKON / D	8.000,00
121	Dispenser	POLYTRON / -	2.000,00
122	Dispenser	POLYTRON / -	1.250,00
123	Dispenser	ARISA / -	1.250,00
124	Dispenser	Polytron / PWC	2.500,00
125	Mimbar/Podium	lokal / -	5.000,00
126	Karpet	CROWN /	2.000,00
127	Gordyin/Kray	PINGUIN / BAK	1.527,80
128	Gordyin/Kray	LOKAL / -	12.000,00
129	Gordyin/Kray	LOKAL / -	2.000,00
130	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Carash / sound	3.230,00
131	Alat Rumah Tangga Lain-lain	LOKAL / KABEL	1.110,30
132	Alat Rumah Tangga Lain-lain	YZDZ / KABEL	454,25
133	Alat Rumah Tangga Lain-lain	MORIS /	3.819,50
134	Alat Rumah Tangga Lain-lain	LOKAL /	4.200,00
135	Alat Rumah Tangga Lain-lain	LOKAL / RODA	2.000,00
136	Alat Rumah Tangga Lain-lain	ARTCO / RODA	500,00
137	Alat Rumah Tangga Lain-lain	ARTCO / RODA	500,00
138	Alat Rumah Tangga Lain-lain	YAMAHA /	3.500,00
139	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Lokal / Lokal	13.000,00
140	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Lokal / -	22.727,25
141	Lemari Arsip Pejabat lainnya	Lokal / Lokal	890,00
142	Microphone/Wireless MIC	JMK /	2.500,00
143	peralatan studio audio lainnya	CORES / DVD	454,25
144	Layar Film/Projector	VIEWSONIC / -	6.000,00
145	Layar Film/Projector	Epson /	15.950,00
146	Mesin Barcode	Zebra /	1.958,00
147	Telephone Mobile	SAMSUNG /	9.000,00
148	Handy Talky (HT)	ALINCO /	1.000,00
149	Handy Talky (HT)	Alinco / DJ-A10	2.860,00
150	Facsimile	Panasonic /	1.980,00
151	Genset	SHARK / SG	15.548,39
152	Senter	Luby	750,00
153	Alat Kedokteran umum lainnya	VIKACHECK.00	1.925,00
154	Alat Kedokteran umum lainnya	SFC / -	698,50
155	Stabilizer	MATSUNAGA /	2.000,00
156	Stabilizer	MATSUNAGA /	2.950,00
157	Stabilizer/UPS	POWER UP / -	750,00
158	Stabilizer/UPS	PROLINK / -	631,95

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	Harga (ribuan Rp)
159	Stabilizer/UPS	prolink /	1.000,00
160	Stabilizer/UPS	ICA / CE 1200	2.000,00
161	recorder display lainnya (dst)	Canon / G	4.950,00
162	P.C Unit	LG / -	10.093,90
163	P.C Unit	DAZUMBA / -	19.976,00
164	P.C Unit	BENQ / -	5.000,00
165	P.C Unit	LG / CORE i5	7.000,00
166	P.C Unit	HP / 110-050d	7.000,00
167	P.C Unit	HP COMPAQ	7.471,82
168	P.C Unit	SAMSUNG / -	6.517,50
169	P.C Unit	DAZUMBA / DE	7.000,00
170	P.C Unit	HP / ALL-inOne	8.000,00
171	P.C Unit	Acer / Aspire	10.490,00
172	P.C Unit	Hp / 200 Pro	24.700,00
173	Lap Top	ACER / ASPIRE	8.400,00
174	Lap Top	ASUS / X 450C	8.125,00
175	Lap Top	HP PAVILION	10.875,00
176	Lap Top	ASUS / X455L	10.000,00
177	Lap Top	HP / Pavilion	11.000,00
178	Lap Top	Asus / A442U	23.000,00
179	Lap Top	Asus / A516j	20.156,00
180	Lap Top	Acer /	14.690,00
181	Hard Disk	Lokal / Lokal	675,00
182	Speaker Komputer	Advan / Lokal	863,00
183	Monitor	LG / 17 INCHI	1.100,00
184	Printer (Peralatan Personal	Epson / L5190	12.450,00
185	Printer (Peralatan Personal	EPSON / L 110	1.500,00
186	Printer (Peralatan Personal	EPSON /	3.000,00
187	Printer (Peralatan Personal	HP / DESKJET	1.000,00
188	Printer (Peralatan Personal	HP / DESKJET	1.000,00
189	Printer (Peralatan Personal	FUJI XEROX /	1.900,00
190	Printer (Peralatan Personal	EPSON / L365	3.000,00
191	Printer (Peralatan Personal	Canon / G2000	4.500,00
192	Printer (Peralatan Personal	Hp / Officejet	4.400,00
193	Printer (Peralatan Personal	Epson / L3110	8.585,24
194	Printer (Peralatan Personal	Zebra / Zd888t	3.000,00
195	Printer (Peralatan Personal	Epson /	5.100,00
196	Scanner (Peralatan Personal	Hp / Scanjet	6.097,00
197	Router	D-Link / -	1.251,00
198	Modem	WAVECOM /	2.500,00
199	Tenda	LOKAL / DOME	8.000,00
200	Alat Tenis Meja	-	5.000,00
Total			1.639.958,27

Sumber : Subbag Umpeg Kecamatan Cicalengka, 2024

Tabel 2.8
Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (Kib) C
Gedung dan Bangunan

No	Jenis Barang / Nama Barang	Luas Lantai (M2)	Lokasi	Keterangan	Harga (Ribu Rp)
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	216	JL. RAYA CICALENGKA TIMUR No. 344 Ds. Cicalengka Kulon Kec. Cicalengka	Ex Kantor Kecamatan pinjam pakai uptd	1.777.785,40

No	Jenis Barang / Nama Barang	Luas Lantai (M2)	Lokasi	Keterangan	Harga (Ribu Rp)
				TK/SD Disdik	
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	60	JL. RAYA CICALENGKA NO. 298 Ds. Cicalengka Kulon Kec. Cicalengka	Pos Damkar	82.440,00
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	96	JL. RAYA CICALENGKA TIMUR No. 344 Ds. Cicalengka Kulon Kec. Cicalengka	Ruang para kasi	207.612,00
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	126	JL. RAYA CICALENGKA TIMUR No. 344 Ds. Cicalengka Kulon Kec. Cicalengka	Mushola	214.924,89
5	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	20	JL. RAYA CICALENGKA TIMUR No. 344 Ds. Cicalengka Kulon Cicalengka	BRONJONG	61.782,00
6	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	76	Desa Cicalengka Wetan	Gedung Pkk, Arsip Dan Satpol	99.760,00
7	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	600	JL. RAYA CICALENGKA TIMUR No. 344 Ds. Cicalengka Kulon Kec. Cicalengka	Lapangan Basket	41.738,60
8	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1.000	Jl. Raya Timur No. 344 Cicalengka	Rumdin Camat	165.550,00
9	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	360	Jl. Dipati Ukur Cicalengka		204.094,00
10	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	140	JL. RAYA CICALENGKA TIMUR No. 344 Ds. Cicalengka Kulon Kec. Cicalengka		147.042,00
Total					3.002.728,89

Sumber : Subbag Umpeg Kecamatan Cicalengka, 2024

Tabel 2.9
Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (Kib) D
Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Keterangan	Harga (Ribu Rp)
1	Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Irigasi)	18	Desa Margasih Kecamatan Cicalengka		50.810,00

No	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Keterangan	Harga (Ribu Rp)
2	Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Irigasi)	15	Ds. Narawita Kec. Cicalengka	Drainase	50.361,00
Jumlah Harga					101.171,00

Sumber : Subbag Umpeg Kecamatan Cicalengka, 2024

Dengan demikian, sarana dan prasarana yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) Kecamatan Cicalengka, mulai dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, hingga jalan, irigasi, dan jaringan, memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang kelancaran tugas pemerintahan serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Keberadaan dan pemanfaatan aset-aset tersebut perlu dijaga dan dikelola secara optimal agar dapat terus memberikan manfaat dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di wilayah Kecamatan Cicalengka.

2.1.3 Kinerja penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Cicalengka

Menurut Torang (2014:74), “Kinerja adalah kuantitas atau kualitas hasil kerja individu atau sekelompok dalam organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang berpedoman pada norma, standar operasional prosedur, kriteria, dan ukuran yang telah ditetapkan atau berlaku dalam organisasi.”

Dengan berpedoman pada definisi tersebut, tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Cicalengka dapat dilihat dari capaian Rencana Strategis (Renstra) periode sebelumnya (2021–2026). Pada periode tersebut, Kecamatan Cicalengka telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan indikator kinerja dan target tertentu sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan.

Secara kelembagaan, kedudukan kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Pelaksanaan tugas pokok Camat sebagai perangkat daerah adalah membantu Bupati dalam bidang pemerintahan daerah.

Kewenangan tersebut diatur dalam Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/Kep.769-TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah, yang meliputi bidang-bidang:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
4. Sosial
5. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6. Pertanahan
7. Lingkungan Hidup
8. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9. Pemberdayaan Masyarakat Desa
10. Komunikasi dan Informatika
11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
12. Penanaman Modal
13. Kepemudaan dan Olahraga
14. Kebudayaan
15. Pariwisata
16. Pertanian

Seluruh kewenangan tersebut telah dilaksanakan oleh Kecamatan Cicalengka sepanjang periode 2021–2026. Namun, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan tersebut memerlukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan capaian sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan antara program kerja yang direncanakan di awal tahun dengan realisasi pelaksanaannya pada akhir tahun, sehingga dapat diidentifikasi capaian, kendala, serta langkah perbaikan ke depan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa meskipun berbagai program telah dijalankan, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Hal ini dipengaruhi oleh kompleksitas tugas dan fungsi

kecamatan, yang selain melaksanakan kewenangan dari Bupati juga harus memfasilitasi pelaksanaan tugas dari SKPD lain serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.

Namun demikian, optimalisasi pelaksanaan kewenangan tersebut masih terkendala oleh keterbatasan:

1. Personel (jumlah dan kapasitas SDM belum sebanding dengan beban kerja),
2. Pendanaan (alokasi anggaran masih terbatas untuk mendukung semua kewenangan yang dilimpahkan),
3. Sarana dan Prasarana (fasilitas kerja, infrastruktur pelayanan publik, serta teknologi informasi masih perlu ditingkatkan), dan
4. Dokumen P3D (Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen) yang belum sepenuhnya terpenuhi.

Dengan demikian, meskipun Kecamatan Cicalengka telah berupaya melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai kewenangan yang diberikan, kinerja pelayanan belum dapat mencapai hasil yang optimal. Hal ini menjadi bahan evaluasi penting untuk perbaikan penyusunan Renstra 2026–2030, agar lebih berorientasi pada peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan SDM, efisiensi pendanaan, serta penyediaan sarana-prasarana pendukung yang memadai, sehingga pelayanan publik dapat lebih efektif, cepat, transparan, dan akuntabel.

2.1.3.1 Data-Data dan Informasi Terkait Pelaksanaan Urusan yang menjadi Tanggung Jawab Kecamatan Cicalengka.

1. Potensi Kecamatan Cicalengka

   Kecamatan Cicalengka adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Bandung yang terletak di bagian timur, Cicalengka terletak 34 km di sebelah timur Kota Bandung atau sekitar 46 km dari Soreang, ibukota Kabupaten Bandung dan memiliki potensi besar yang dapat dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,kesejahteraan masyarakat, serta pembangunan berkelanjutan.

a) Geografis dan Lokasi Strategis

Kecamatan Cicalengka dengan posisi geografis yang dikelilingi perbukitan hijau dan sungai-sungai yang mengalir jernih, memiliki akses yang baik dilalui tiga jalan utama yaitu Jalan Nasional 3, Jalan Raya Cicalengka, dan Jalan Raya Cicalengka-Majalaya selain itu Kecamatan Cicalengka juga bisa diakses dengan kereta api, dengan demikian menunjukkan kemampuan untuk berkembang dan menjadi pusat transportasi di sekitarnya. Kecamatan Cicalengka juga mempunyai 2 (dua) Puskesmas yaitu Puskesmas Cicalengka dan Puskesmas Sawhlega dan sebuah rumah sakit yakni Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka yang tidak jauh dari pusat kecamatan Cicalengka.

b) Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan

Kecamatan Cicalengka menawarkan suasana alam yang asri dan menyejukkan, sungai Citarik yang mengalir di wilayah ini berperan penting bagi sektor pertanian, namun banjir dan tanah longsor dapat terjadi saat curah hujan tinggi. Potensi lainnya di Kecamatan Cicalengka yaitu pemanfaatan Pengelolaan Sampah SIGEMAS, budidaya ikan lele mandiri SELEBRI di Desa Tenjolaya .

c) Ekonomi dan UMKM

Kegiatan ekonomi masyarakat didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Di berbagai desa di Kecamatan Cicalengka, terdapat pelaku UMKM yang bergerak di bidang makanan olahan, kerajinan tangan, konveksi, hingga produksi barang rumah tangga. Potensi ini dapat terus dikembangkan melalui pelatihan, akses permodalan, serta digitalisasi UMKM agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

d) Pariwisata

Pariwisata merupakan sektor jasa yang mendapat perhatian penting, karena dari pariwisata diharapkan dapat memulihkan pertumbuhan ekonomi secara tepat dan

merata, khususnya perekonomian masyarakat local diantaranya

a) Kawasan objek wisata Curug Cinulang

   Objek wisata ini berada di Desa Tanjung Wangi menawarkan pemandangan air terjun yang memiliki 2 aliran air, dan sering disebut air terjun kembar.

b) Bukit Candi atau Pasir Candi

   Bukit Candi berada di ketinggian jadi menarik bisa melihat wilayah timur Kabupaten Bandung. Seperti Nagreg, Majalaya, Paseh, Cikancung yang sudah dipenuhi pemukiman penduduk, gedung pabrik, perkantoran dan bangunan lainnya di bawah pegunungan memanjang.

c) Purnama Kencana atau Purnama Kencana Resort

   Berada di Desa Dampit Merupakan tempat wisata berupa villa dan kolam renang yang sangat nyaman dan bisa juga digunakan untuk mengadakan suatu acara.

d) Pondok Wisata Aki dan Enin

   Sebuah penginapan sekaligus tempat rekreasi yang menawarkan nuansa alam

e) Teras Luhur Café

   Cafe Kekinian yang menyuguhkan pemandangan sangat indah dan strategis

e) Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur di Kecamatan Cicalengka terus mengalami peningkatan. Jalan antar-desa sebagian besar sudah beraspal dan cukup baik untuk mendukung mobilitas warga dan distribusi hasil pertanian maupun produk UMKM. Ketersediaan jaringan listrik dan air bersih juga sudah menjangkau diseluruh wilayah. Ke depan, pengembangan infrastruktur digital seperti akses internet yang merata menjadi salah satu kebutuhan penting, terutama untuk mendukung pendidikan, UMKM, dan layanan publik berbasis teknologi.

f) Sosial dan Budaya

Masyarakat di Kecamatan Cicalengka dikenal sebagai masyarakat yang religius, ramah, dan menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong. Kegiatan sosial dan keagamaan cukup aktif, baik melalui Lembaga pendidikan formal dan non-formal, maupun organisasi kemasyarakatan. Budaya Sunda masih terpelihara kuat dalam kehidupan sehari-hari, terlihat dari bahasa, kesenian, hingga adat istiadat yang tetap dilestarikan. Nilai-nilai ini menjadi modal sosial yang kuat dalam mendorong pembangunan partisipatif dan berkelanjutan.

Dengan segala potensi yang dimiliki, Kecamatan Cicalengka memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi wilayah yang maju, mandiri, dan berdaya saing. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk mengoptimalkan potensi yang ada. Melalui pendekatan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan

2.1.3.2 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian Pelaksanaan IKU Dan IKK Tahun 2021-2024

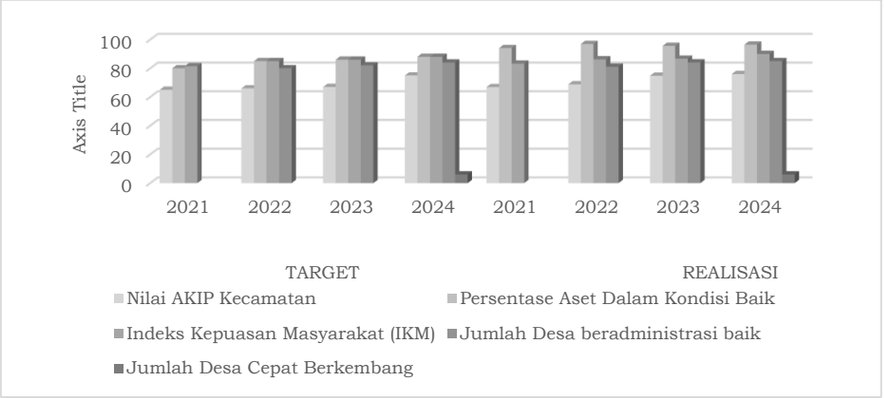
Tingkat Keberhasilan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Cicalengka dapat dilihat atau dicermati dalam Rencana Strategis Periode sebelunya (Periode Tahun 2021 – 2026) dimana Kecamatan Cicalengka telah melaksanakan Program dan Kegiatan dengan indikator dan Target yang harus dicapai. Dan tingkat pencapaiannya sebagaimana tergambar pada Tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.10
Target Dan Realisasi Indikator Kinerja Kecamatan Cicalengka
Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai AKIP Kecamatan	65	65	66	67	75	62,38	66,89	68,81	74,8	76,26
2	Persentase Aset Dalam Kondisi Baik	80,00	80,00	85,00	86,00	88,00	95,10	94,08	96,93	95,63	99,89
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,46	81,46	85	86	88	80,16	83,21	86,22	87	88,5
4	Jumlah Desa beradministrasi baik	-	-	80	82	84	-	-	81,08	84,08	85
5	Jumlah Desa Cepat Berkembang	-	-	-	-	6	-	-	-	-	6

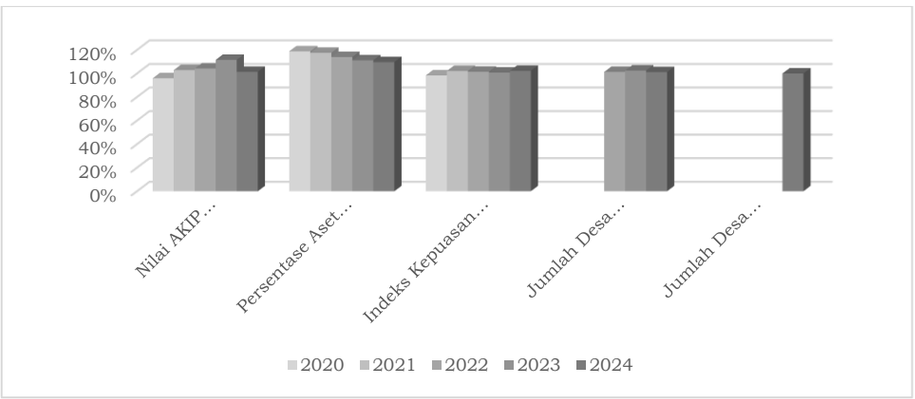
Sumber : Sub Bagian Program dan Keuangan Kec. Cicalengka Tahun 2024

Gambar 2.2
Grafik Target dan Realisasi Kinerja Kecamatan Cicalengka
Tahun 2021-2024



Sumber : Sub Bagian Program dan Keuangan Kec. Cicalengka Tahun 2024

Gambar 2.3
Grafik Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Cicalengka
Tahun 2021-2024



Sumber: Sub Bagian Program dan Keuangan Kec. Cicalengka Tahun 2024

Kecamatan Cicalengka mempunyai 4 indikator sasaran dan pada baris no 5 terdapat indikator perubahan yang merupakan perubahan dari no 4 yang dilakukan pada perubahan renstra tahun 2024, sehingga indikator perubahan tersebut berlaku pada semester kedua tahun 2024.

1. Capaian target IKM

   Target Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) capaian diperoleh telah melebihi target dengan rasio diatas 100%, dari target 88 dengan realisasi 90, hal ini terjadi karena adanya faktor pendorong yang memungkinkan target yang dicapai terus mengalami peningkatan, hal tersebut didukung adannya Sumber daya yang terdiri dari sarana dan prasarana serta SDM layanan meskipun hal tersebut termasuk dalam

permasalahan namun dengan optimalisasi melalui pengawasan internal pelayanan dapat berjalan cepat dan efektif.

2. Capaian target nilai AKIP

   Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja ditujukan pada indikator nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) capaiannya melampaui target dan berada pada level BB kategori. Pada tahun 2024 meraih nilai 76 kategori BB dengan kriteria interpretasi “Sangat Baik”, adapun variable yang menjadi Evaluasi Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (25 %), Pelaporan Kinerja (15%), Evaluasi Internal (10%) Pencapaian Sasaran.

3. Capaian target BMD layak pakai

   Capaian BMD telah sesuai dengan target 96 dengan realisasi 96,50% dan Capaian BMD Layak Pakai sangat dipengaruhi oleh adanya peghapusan pada tahun 2024 melalui Sensus BMD, dimana sejumlah BMD dilakukan penghapusan dan telah dikembalikan ke Bagian Aset (BKAD) Kab Bandung.

4. Capaian Target Jumlah Desa Cepat Berkembang

   Sesuai Tabel di atas bahwa Capaian Jumlah Desa Cepat berkembang capaiannya sesuai target dengan Target 6 Desa dengan realisasi 6 Desa mempunyai capaian 100% ditahun 2024.

Dari capaian target kinerja yang merupakan capaian pelayanan di kecamatan Cicalengka terus mengalami peningkatan, hal ini ditunjang faktor pendorong antara lain:

1. Komitmen pimpinan, dalam hal ini Camat telah memberikan keteladanan dalam penegakan disiplin.
2. Adanya perencanaan yang terukur (realistis).
3. Pengelolaan Manajemen Risiko.
4. Optimalisasi Pembinaan dan Pengawasan internal (SPIP).
5. Koordinasi dan kolaborasi antar unit kerja dan antar individu ASN maupun Non ASN.
6. Efektivitas Anggaran yang berbasis kinerja (adanya *output* dan *outcome*).
7. Pemanfataan Teknologi Informasi melalui penggunaan aplikasi Sakip SIAKANG dan Aplikasi IKM e-SKM kabupaten Bandung.

8. Pengumpulan data kinerja berbasis *Cloud* melalui *Google Drive* sesuai dengan Rekomendasi dari Inspektorat pada LHP hasil Penilaian AKIP.

Selain faktor Pendorong, dalam pencapaian target, terdapat pula faktor penghambat antara lan:

1. Belum optimalnya budaya kerja yang baik;
2. Belum optimalnya sarana dan prasarana;
3. Adanya perubahan regulasi;
4. Belum optimalnya koordinasi antar unit kerja

2.1.3.3 Penyajian hasil evaluasi capaian dan kinerja yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Cicalengka pada Renstra Tahun 2021-2026 mencakup program, kegiatan, dan sub kegiatan

Dalam rangka memastikan keselarasan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, Kecamatan Cicalengka melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja Renstra Tahun 2021–2026. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana implementasi kebijakan yang dilaksanakan telah berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja utama (IKU), indikator kinerja kegiatan (IKK), serta *output* dan *outcome* pembangunan yang menjadi tanggung jawab kecamatan.

Tabel 2.11
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian Pada Tahun ke-		
			2022		2023		2024		2025		2026		2022		2023		2024		2022	2023	2024
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		14	15	16
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai AKIP	66	Poin	67	Poin	75	Poin	76	Poin	77	Poin	68,81	Poin	74,80	Poin	76,26	Poin	104%	112%	102%
		Persentase BMD dalam Kondisi Baik	95,20	%	95,60	%	96,00	%	96,50	%	96,80	%	96,93	%	95,63	%	99,89	%	102%	100%	104%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100%	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	dokumen	8	dokumen	8	dokumen	6	dokumen	6	dokumen	3	dokumen	8	dokumen	8	dokumen	100%	100%	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	3	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	100%	100%	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	3	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	100%	100%	100%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	2	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	100%	100%	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	3	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	100%	100%	100%
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah							1	dokumen	1	dokumen									
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah							12	data	12	data									
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Anggaran/Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100%	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	bulan	18	ob	18	ob	20	orang/ bulan	22	orang/ bulan	12	bulan	18	ob	18	ob	100%	100%	100%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	8	dokumen	8	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	100%	100%	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	4	laporan	4	laporan	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	100%	100%

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian Pada Tahun ke-		
			2022		2023		2024		2025		2026		2022		2023		2024		2022	2023	2024
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		14	15	16
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	10	laporan	2	laporan	4	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100%	100%	100%
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	100%	100%
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100%	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100%	100%
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	orang	0	orang	0	orang		orang		orang	0	orang	0	orang	0	orang			
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	23	orang	40	orang	40	orang	50	orang	50	orang	23	orang	40	orang	40	orang	100%	100%	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100%	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6		7	jenis	7	jenis	10	paket	5	paket	6		7	jenis	7	jenis	100%	100%	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23		24	jenis	24	jenis	24	paket	24	paket	23		24	jenis	24	jenis	100%	100%	100%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12		13	jenis	13	jenis	13	paket	5	paket	12		13	jenis	13	jenis	100%	100%	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1786		3	paket	3	paket	3	paket	3	paket	1786		3	paket	3	paket	100%	100%	100%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4		3	paket	3	paket	12	paket	3	paket	4		3	paket	3	paket	100%	100%	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2		2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2		2	dokumen	2	dokumen	100%	100%	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						1	laporan	0	laporan	1	laporan					1	laporan			100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100%	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah yang tersedia																			

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian Pada Tahun ke-		
			2022		2023		2024		2025		2026		2022		2023		2024		2022	2023	2024
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		14	15	16
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang tersedia		unit	0	unit	0	unit		unit	-	unit		unit	0	unit	0	unit			
	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang tersedia		set	0	set	1	set		set	-	set		set	0	set	1	set			100 %
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	jenis	4	jenis	0	jenis	0	jenis	-	jenis	6	jenis	4	jenis	0	jenis	100 %	100%	
	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang tersedia																			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia		jenis	0	sarana	1	sarana		jenis	-	jenis		jenis	0	sarana	1	sarana			100 %
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		kegiatan	0	kegiatan	0	unit		kegiatan	-	kegiatan		kegiatan	0	kegiatan	0	unit			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100 %	100%	100 %
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000	lembar	250	lembar	0	laporan	0	laporan	-	laporan	1000	lembar	250	lembar	0	laporan	100 %	100%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	jenis	3	laporan	3	laporan	5	laporan	1	laporan	3	jenis	3	laporan	3	laporan	100 %	100%	100 %
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	unit									2	unit					100 %		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6	ob	6	orang	6	orang	5	laporan	1	laporan	6	ob	6	orang	6	orang	100 %	100%	100 %
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100 %	100%	100 %
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	unit	6	unit	6	unit	6	unit	6	unit	6	unit	6	unit	6	unit	100 %	100%	100 %
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara					0	buah	0	unit	-	unit					0	buah			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			2	unit	4	unit	2	unit	3	unit			2	unit	4	unit		100%	100 %
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	kegiatan		dokumen	1	sarana	4	unit	1	unit	1	kegiatan		dokumen	1	sarana	100 %		100 %
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1	sarana	1	sarana	0	unit	1	unit			1	sarana	1	sarana		100%	100 %
2		Nilai IKM	85		86		88		90		91		86,2		87		88,5		101 %	101%	101 %

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian Pada Tahun ke-		
			2022		2023		2024		2025		2026		2022		2023		2024		2022	2023	2024
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		14	15	16
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100 %	100%	100 %
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3	kegiatan	1	laporan	1	laporan	1	laporan	1	laporan	3	kegiatan	1	laporan	1	laporan	100 %	100%	100 %
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100 %	100%	100 %
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2	kegiatan	1	laporan	1	laporan	1	laporan	1	laporan	2	kegiatan	1	laporan	1	laporan	100 %	100%	100 %
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	51	orang	1	laporan	1	laporan	1	laporan	1	laporan	51	orang	1	laporan	1	laporan	100 %	100%	100 %
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100 %	100%	100 %
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			1	dokumen	12	dokumen	1	dokumen	1	dokumen			1	dokumen	12	dokumen		100%	100 %
	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta			0	dokumen	0	dokumen	1	unit	1	unit			0	dokumen	0	dokumen			
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100 %	100%	100 %
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan			0	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	-	dokumen			0	dokumen	0	dokumen			
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan			0	laporan	0	dokumen	0	laporan	-	laporan			0	laporan	0	dokumen			
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	70	orang	3	laporan	3	laporan	12	laporan	3	laporan	70	orang	3	laporan	3	laporan	100 %	100%	100 %
		Persentase Desa Beradministrasi Baik	80	%	82	%	84	%	85	%	86	%	81,1	%	84,1	%			101 %	103%	0%
		Jumlah Desa Cepat Berkembang	0				6	Desa	8	Desa	10	Desa					6	Desa			100 %

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian Pada Tahun ke-		
			2022		2023		2024		2025		2026		2022		2023		2024		2022	2023	2024
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		14	15	16
		Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100 %	100%	100 %
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100 %	100%	100 %
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	200	orang	4	lembaga kemasyarakatan	4	lembaga kemasyarakatan	4	lembaga kemasyarakatan	4	lembaga kemasyarakatan	200	orang	4	lembaga kemasyarakatan	4	lembaga kemasyarakatan	100 %	100%	100 %
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100 %	100%	100 %
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	kegiatan	1	laporan	1	laporan	1	laporan	1	laporan	2	kegiatan	1	laporan	1	laporan	100 %	100%	100 %
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase desa yang menerapkan Administrasi Pemerintahan Desa berdasarkan peraturan	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100 %	100%	100 %
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya			4	lembaga kemasyarakatan	4	lembaga kemasyarakatan	4	lembaga kemasyarakatan	4	lembaga kemasyarakatan			4	lembaga kemasyarakatan	4	lembaga kemasyarakatan		100%	100 %
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan			2	unit	2	unit	2	unit	2	unit			2	unit	2	unit		100%	100 %
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			1	laporan	1	laporan	1	laporan	1	laporan			1	laporan	1	laporan		100%	100 %
	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			1	laporan	1	laporan	1	laporan	1	laporan			1	laporan	1	laporan		100%	100 %
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100 %	100%	100 %
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga							60	keluarga	30	keluarga									
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Terlaksananya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga							80	keluarga	30	keluarga									
		Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum																			
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100 %	100%	100 %

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian Pada Tahun ke-		
			2022		2023		2024		2025		2026		2022		2023		2024		2022	2023	2024
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		14	15	16
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			1	laporan	1	laporan	1	laporan	1	laporan			1	laporan	1	laporan		100%	100 %
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100 %	100%	100 %
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			2	laporan	2	laporan	4	laporan	2	laporan			2	laporan	2	laporan		100%	100 %
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			1	laporan	1	laporan	5	laporan	1	laporan			1	laporan	1	laporan		100%	100 %
		Persentase capaian Pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan dan Ketertiban Umum																			
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100 %	100%	100 %
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			50	orang	50	orang	21	orang	21	orang			50	orang	50	orang		100%	100 %
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	2	kegiatan					0	orang	0	orang	2	kegiatan					100 %		
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	120	orang			100	orang	100	orang	100	orang	120	orang			100	orang	100 %		100 %
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	laporan	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	1	dokumen	12	laporan	2	dokumen	2	dokumen	100 %	100%	100 %
		Persentase capaian Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																			
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	Persentase Desa yang dibina	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100 %	100%	100 %

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian Pada Tahun ke-		
			2022		2023		2024		2025		2026		2022		2023		2024		2022	2023	2024
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		14	15	16
	Pengawasan Pemerintahan Desa																				
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12	dokumen	12	dokumen	12	dokumen	12	dokumen	12	dokumen	12	dokumen	12	dokumen	12	dokumen	100%	100%	100%
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12	dokumen	24	dokumen	24	dokumen	1	dokumen	24	dokumen	12	dokumen	24	dokumen	24	dokumen	100%	100%	100%
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa							0	dokumen											
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3	dokumen	1	dokumen	1	dokumen			1	dokumen	3	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	100%	100%
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																			

Sumber : Hasil Analisis Kecamatan Cicalengka, 2025

Tabel 2.12
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	5.714.135.000,00	4.647.911.837,00	5.144.944.483,00	4.580.891.430,56	3.934.385.017,00	4.661.993.858,00	4.218.912.104,00	4.997.700.018,00	81,59%	90,77%	97,14%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.100.000,00	35.550.000,00	50.410.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	37.117.000,00	35.140.000,00	50.407.600,00	67,36%	98,85%	100,00%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.100.000,00	5.100.000,00	25.000.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	4.970.000,00	24.999.800,00	100,00%	97,45%	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	50.750.000,00	15.450.000,00	15.000.000,00	750.000,00	750.000,00	32.895.000,00	15.350.000,00	14.999.600,00	64,82%	99,35%	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	750.000,00	5.000.000,00	3.470.000,00	750.000,00	750.000,00	700.000,00	4.920.000,00	3.469.600,00	93,33%	98,40%	99,99%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	750.000,00	5.000.000,00	3.470.000,00	750.000,00	750.000,00	721.000,00	5.000.000,00	3.469.000,00	96,13%	100,00%	99,97%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	750.000,00	5.000.000,00	3.470.000,00	750.000,00	750.000,00	701.000,00	4.900.000,00	3.469.600,00	93,47%	98,00%	99,99%
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1.000.000,00	1.000.000,00						
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				1.000.000,00	1.000.000,00						
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.880.132.000,00	4.178.856.968,00	4.148.793.072,00	4.136.279.930,56	3.528.656.017,00	3.887.716.540,00	3.768.678.872,00	4.047.974.030,00	79,66%	90,18%	97,57%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.867.532.000,00	4.166.256.968,00	4.134.873.072,00	4.123.679.930,56	3.518.056.017,00	3.876.867.640,00	3.756.298.872,00	4.034.054.830,00	79,65%	90,16%	97,56%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.150.000,00	3.150.000,00	3.480.000,00	3.150.000,00	2.150.000,00	2.943.000,00	3.060.000,00	3.479.800,00	93,43%	97,14%	99,99%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.150.000,00	3.150.000,00	3.480.000,00	3.150.000,00	2.150.000,00	2.685.900,00	3.100.000,00	3.479.800,00	85,27%	98,41%	99,99%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.150.000,00	3.150.000,00	3.480.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	2.602.800,00	3.110.000,00	3.479.800,00	82,63%	98,73%	99,99%
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.150.000,00	3.150.000,00	3.480.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	2.617.200,00	3.110.000,00	3.479.800,00	83,09%	98,73%	99,99%
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	11.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	8.181.800,00	10.000.000,00	10.000.000,00	81,82%	100,00%	86,96%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							10.000.000,00	10.000.000,00			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	11.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	8.181.800,00	-	11.470.000,00	81,82%	0,00%	99,74%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		-	-		-	-	-	-			
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000,00	10.000.000,00	11.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	8.181.800,00		11.470.000,00	81,82%	0,00%	99,74%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	107.180.050,00	96.509.000,00	130.555.811,00	124.376.640,00	134.665.000,00	90.853.900,00	93.217.500,00	129.509.600,00	84,77%	96,59%	99,20%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	4.000.000,00	2.498.300,00	2.500.000,00	2.334.050,00	2.498.900,00	3.998.800,00	93,36%	99,96%	99,97%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.070.050,00	12.500.000,00	48.343.400,00	44.508.340,00	44.509.000,00	11.238.050,00	12.498.900,00	48.271.600,00	85,98%	99,99%	99,85%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	5.844.600,00	7.744.400,00	7.962.700,00	73,06%	96,81%	99,53%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58.029.000,00	47.928.000,00	31.759.000,00	43.789.000,00	54.075.000,00	57.980.000,00	47.928.000,00	31.758.800,00	99,92%	100,00%	100,00%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.605.000,00	2.605.000,00	4.687.411,00	2.605.000,00	1.605.000,00	1.677.200,00	2.567.300,00	4.649.000,00	64,38%	98,55%	99,18%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	22.976.000,00	22.976.000,00	22.976.000,00	22.976.000,00	22.976.000,00	11.780.000,00	19.980.000,00	22.127.100,00	51,27%	86,96%	96,31%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			10.790.000,00	-	1.000.000,00			10.741.600,00			99,55%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28.938.950,00	39.463.504,00	34.156.600,00	-	-	28.930.000,00	39.406.600,00	34.155.600,00	99,97%	99,86%	100,00%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan				-	-	-					
Pengadaan Mebel			18.156.600,00	-	-	-		18.156.000,00			100,00%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.938.950,00	39.463.504	-	-	-	28.930.000,00	39.406.600,00		99,97%	99,86%	
Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				-	-	-					
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-			-	-	-					
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			16.000.000,00	-	-	-	-	15.999.600,00			100,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	236.732.000,00	242.314.650,00	300.977.000,00	244.272.360,00	205.412.000,00	222.403.718,00	242.003.732,00	264.961.027,00	93,95%	99,87%	88,03%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	2.288.000,00	2.492.400,00	-	91,52%	99,70%	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.572.000,00	40.734.650	52.617.000,00	46.935.960,00	37.572.000,00	24.229.046,00	40.452.932,00	41.211.027,00	64,49%	99,31%	78,32%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.500.000,00	-	-	-	-	1.750.000,00			70,00%		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	194.160.000,00	199.080.000	248.360.000,00	197.336.400,00	167.840.000,00	194.136.672,00	199.058.400,00	223.750.000,00	99,99%	99,99%	90,09%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	396.052.000,00	45.217.715,00	468.552.000,00	58.862.500,00	48.552.000,00	386.790.900,00	40.465.400,00	459.222.161,00	97,66%	89,49%	98,01%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.200.000,00	20.960.000,00	68.200.000,00	34.750.500,00	24.200.000,00	16.933.000,00	16.640.400,00	60.659.500,00	69,97%	79,39%	88,94%
Pemeliharaan Mebel		722.400,00	-	-	-	-	720.000,00			99,67%	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.500.000,00	6.000.000,00	12.000.000,00	5.760.000,00	6.000.000,00	2.750.000,00	5.570.000,00	11.780.000,00	78,57%	92,83%	98,17%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	368.352.000,00		200.000.000,00	18.352.000,00	18.352.000,00	367.107.900,00	-	199.471.939,00	99,66%		99,74%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		17.535.315,00	188.352.000,00	-	-	-	17.535.000,00	187.310.722,00		100,00%	99,45%
Jumlah 1	5.714.135.000,00	4.647.911.837,00	5.144.944.483,00	4.580.891.430,56	3.934.385.017,00	4.661.993.858,00	4.218.912.104,00	4.997.700.018,00	81,59%	90,77%	97,14%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	153.000.000,00	138.475.800,00	387.290.000,00	500.990.000,00	219.780.000,00	131.729.600,00	134.453.800,00	387.289.200,00	86,10%	97,10%	100,00%
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3.780.000,00	10.780.000,00	4.230.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	3.625.500,00	10.630.000,00	4.229.800,00	95,91%	98,61%	100,00%
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3.780.000,00	10.780.000	4.230.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	3.625.500,00	10.630.000,00	4.229.800,00	95,91%	98,61%	100,00%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	21.220.000,00	13.070.000,00	18.400.000,00	67.250.000,00	17.250.000,00	18.976.300,00	9.510.000,00	18.400.000,00	89,43%	72,76%	100,00%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	6.500.000,00	4.430.000,00	7.300.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	4.294.300,00	4.310.000,00	7.300.000,00	66,07%	97,29%	100,00%
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14.720.000,00	8.640.000,00	11.100.000,00	60.750.000,00	10.750.000,00	14.682.000,00	5.200.000,00	11.100.000,00	99,74%	60,19%	100,00%
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	8.280.000,00	5.775.000,00	13.750.000,00	13.750.000,00	-	8.208.800,00	5.775.000,00		99,14%	100,00%
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		8.280.000,00	5.775.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-	8.208.800,00	5.775.000,00		99,14%	100,00%
Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta		-	-	7.750.000,00	7.750.000,00	-	-	-			
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	128.000.000,00	106.345.800,00	358.885.000,00	414.990.000,00	183.780.000,00	109.127.800,00	106.105.000,00	358.884.400,00	85,26%	99,77%	100,00%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		-	-			-	-	-			
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		-	-			-	-	-			
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	128.000.000,00	106.345.800,00	358.885.000,00	414.990.000,00	183.780.000,00	109.127.800,00	106.105.000,00	358.884.400,00	85,26%	99,77%	100,00%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	40.000.000,00	39.293.850,00	164.817.000,00	188.987.900,00	139.750.000,00	109.127.800,00	131.924.400,00	164.635.200,00	272,82%	335,74%	99,89%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	40.000.000,00	12.770.000,00	92.008.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	109.127.800,00	106.105.000,00	91.827.000,00	272,82%	830,89%	99,80%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.000.000,00	2.140.000,00	1.500.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	9.716.000,00		1.500.000,00	97,16%	0,00%	100,00%
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	20.000.000,00	2.060.000,00	3.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	19.710.000,00		3.000.000,00	98,55%	0,00%	100,00%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.000.000,00	8.570.000,00	87.508.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00		87.327.000,00	100,00%	0,00%	99,79%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	26.523.850,00	72.809.000,00	78.737.900,00	77.750.000,00	-	25.819.400,00	72.808.200,00		97,34%	100,00%
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		10.750.000,00	33.575.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-	10.229.800,00	33.574.600,00		95,16%	100,00%
Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan		2.000.000,00	2.000.000,00	1.987.900,00	750.000,00	-	1.999.800,00	1.999.600,00		99,99%	99,98%
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		2.614.800,00	25.650.000,00	14.750.000,00	15.000.000,00	-	2.614.800,00	25.650.000,00		100,00%	100,00%
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		11.159.050,00	11.584.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00		10.975.000,00	11.584.000,00		98,35%	100,00%
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-	-	50.250.000,00	2.000.000,00	-	-	-			
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				25.150.000,00	1.000.000,00		-	-			

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				25.100.000,00	1.000.000,00		-	-			
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	17.940.846,00	71.763.000,00	68.912.000,00	66.912.000,00	-	17.680.000,00	71.762.400,00		98,55%	100,00%
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	1.513.000,00	36.513.000,00	20.912.000,00	20.912.000,00	-	1.400.000,00	36.512.600,00		92,53%	100,00%
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		1.513.000,00	36.513.000,00	20.912.000,00	20.912.000,00		1.400.000,00	36.512.600,00		92,53%	100,00%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	16.427.846,00	35.250.000,00	48.000.000,00	46.000.000,00	-	16.280.000,00	35.249.800,00		99,10%	100,00%
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		7.840.000,00	20.505.000,00	24.000.000,00	23.000.000,00		7.820.000,00	20.505.000,00		99,74%	100,00%
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		8.587.846,00	14.745.000,00	24.000.000,00	23.000.000,00		8.460.000,00	14.744.800,00		98,51%	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	128.987.000,00	66.479.000,00	96.748.900,00	82.308.000,00	82.308.000,00	117.045.000,00	65.889.000,00	96.748.000,00	90,74%	99,11%	100,00%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	128.987.000,00	66.479.000,00	96.748.900,00	82.308.000,00	82.308.000,00	117.045.000,00	65.889.000,00	96.748.000,00	90,74%	99,11%	100,00%
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		27.544.000,00	44.470.900,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-	27.544.000,00	44.470.400,00		100,00%	100,00%
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	38.196.000,00		-			38.172.500,00	-	-	99,94%		
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	48.108.000,00		14.778.000,00	23.108.000,00	23.108.000,00	47.160.000,00	-	14.777.800,00	98,03%		100,00%
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	42.683.000,00	38.935.000,00	37.500.000,00	29.200.000,00	29.200.000,00	31.712.500,00	38.345.000,00	37.499.800,00	74,30%	98,48%	100,00%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	72.111.000,00	76.650.000,00	181.978.000,00	89.919.600,00	93.238.000,00	70.816.000,00	76.631.000,00	181.928.400,00	98,20%	99,98%	99,97%
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	72.111.000,00	76.650.000,00	181.978.000,00	89.919.600,00	93.238.000,00	70.816.000,00	76.631.000,00	181.928.400,00	98,20%	99,98%	99,97%
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	21.180.000,00	11.469.000,00	96.180.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	21.167.500,00	11.450.000,00	96.179.800,00	99,94%	99,83%	100,00%
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20.013.000,00	11.469.000,00	31.180.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	19.612.500,00	11.469.000,00	31.179.600,00	98,00%	100,00%	100,00%
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				-		-	-	-			
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	30.918.000,00	53.712.000,00	54.618.000,00	39.919.600,00	43.238.000,00		53.712.000,00	54.569.000,00	0,00%	100,00%	99,91%
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		-	-			30.036.000,00	-	-			

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Jumlah 2	394.098.000,00	338.839.496,00	902.596.900,00	931.117.500,00	601.988.000,00	428.718.400,00	426.578.200,00	902.363.200,00	108,78%	125,89%	99,97%
Jumlah Total	6.108.233.000,00	4.986.751.333,00	6.047.541.383,00	5.512.008.930,56	4.536.373.017,00	5.090.712.258,00	4.645.490.304,00	5.900.063.218,00	83,34%	93,16%	97,56%

Sumber : Hasil Analisis Kecamatan Cicalengka, 2025

2.1.4 Kelompok sasaran pelayanan Kecamatan Cicalengka

1. Aparatur Kecamatan (ASN dan Non ASN)

   Aparatur Kecamatan merupakan salah satu sasaran utama dalam reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas, dan transformasi kelembagaan. Diharapkan, aparatur mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja organisasi, sekaligus mendukung terwujudnya Kabupaten Bandung yang lebih BEDAS dengan ASN yang BERAKHLAK.

2. Masyarakat Umum

   Sasaran utama pelayanan publik, baik pelayanan administrasi maupun fasilitasi pendistribusian bantuan sosial, adalah masyarakat. Kecamatan Cicalengka berkomitmen memberikan layanan optimal, termasuk kepada kelompok masyarakat rentan dan penyandang disabilitas.

3. Lembaga Kemasyarakatan dan Forum Masyarakat

   Lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan maupun desa menjadi sasaran pemberdayaan melalui kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, serta sosialisasi yang berfokus pada penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat.

4. Pemerintahan Desa

   Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa merupakan tugas atributif dan delegatif Camat. Sasaran pelayanan mencakup fasilitasi, koordinasi, pembinaan, serta pengawasan tata kelola pemerintahan desa, termasuk pengelolaan keuangan desa.

5. Kelompok Ekonomi Masyarakat

   Kecamatan memfasilitasi dan membina kelompok ekonomi masyarakat, seperti kelompok tani dan UMKM, melalui layanan pendampingan, pelatihan, serta pemberdayaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

6. Kelompok Agama danBudaya

   Camat berperan menjalin kemitraan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan serta kebudayaan, sehingga kegiatan berjalan tertib, lancar, dan harmonis.

7. Kelompok Pemuda dan Olahraga

   Pemuda dan kelompok olahraga merupakan pemangku kepentingan penting dalam aktivitas kemasyarakatan. Camat memberikan fasilitasi dan pembinaan sesuai kewenangan guna mendorong pengembangan potensi pemuda serta peningkatan prestasi olahraga.

2.1.5 Mitra Kecamatan Cicalengka dalam pemberian pelayanan

1. Perangkat Daerah Kabupaten (Dinas dan Badan)

   Kecamatan menjalin koordinasi dan kemitraan dengan seluruh perangkat daerah di tingkat kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi fasilitasi, serta tugas pembantuan sesuai peta relasi pemerintahan yang bersifat *pro bisnis*.
2. Pemerintah Desa dan Kelurahan

   Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan, Kecamatan bermitra dengan pemerintah desa dan kelurahan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Camat memiliki tugas atributif melakukan pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa sesuai Permendagri Nomor 73 Tahun 2020.
3. Lembaga Kemasyarakatan dan Forum Masyarakat

   Lembaga kemasyarakatan dan forum masyarakat seperti LPM, Karang Taruna, dan PKK menjadi mitra strategis dalam penyelenggaraan kegiatan sosial, pemberdayaan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

   BPD berperan sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintahan desa serta menjadi mitra kecamatan dalam menjaring, menyampaikan, dan mengawal aspirasi masyarakat di tingkat desa.
5. Dunia Usaha dan Pelaku Ekonomi Lokal

   Dunia usaha, koperasi, dan UMKM merupakan mitra strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta memperluas akses layanan ekonomi masyarakat.

6. Tokoh Masyarakat,Tokoh Agama,dan Tokoh Pemuda
   Keterlibatan tokoh lokal sangat penting untuk mendorong partisipasi masyarakat, menjaga kerukunan sosial, dan memperkuat nilai-nilai lokal dalam pembangunan wilayah.
7. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Non-Pemerintah (NGO).
   LSM dan NGO berperan mendukung program pemberdayaan, advokasi sosial, serta peningkatan kapasitas masyarakat melalui kolaborasi dengan kecamatan.
8. Aparat Keamanan (Polsek dan Koramil)
   Dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, Kecamatan bermitra dengan aparat keamanan guna menciptakan suasana kondusif yang mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Cicalengka

Selama kurun waktu 5 (lima} tahun, Pemerintahan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung dituntut lebih respontif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal maupun regional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang dihadapi sehingga diharapkan penyelenggaraan pemerintahan menuju kepada Pemerintah good govermance and *Clean Govermance* sehingga berdampak pada kualitas pelayanan daerah.

2.2.1 Penelaahan RPJMN 2025-2029

RPJMN 2025–2029 adalah rencana pembangunan lima tahunan yang menjadi pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah. Rencana ini mengacu pada visi besar *Indonesia Emas 2045*, dengan tujuan menjadikan Indonesia setara dengan negara maju.

Visi Presiden 2025–2029, “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”, dijalankan melalui Delapan Asta Cita dan Delapan Prioritas Nasional. Fokus utamanya meliputi pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan, pelayanan publik yang lebih

baik, tata kelola pemerintahan yang kuat, serta pemanfaatan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya reformasi politik, hukum, dan birokrasi untuk mencegah dan memberantas korupsi, narkoba, judi, serta penyelundupan. Langkah ini menjadi kunci untuk membangun pemerintahan yang bersih, adil, dan berintegritas dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.

Isu, sasaran dan arah kebijakan nasional yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Cicalengka dijabarkan pada Tabel berikut :

Tabel 2.13
Isu Nasional, Sasaran Nasional dan Arah Kebijakan RPJMN Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi

No	Isu Nasional	Sasaran Nasional	Arah Kebijakan
1	Rendahnya Kepatuhan Hukum Masyarakat dan penyelenggara Negara	Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta system politik yang fungsional	Penguatan Kelembagaan, Pelayanan, dan Penegakan hukum
2	Keterpaduan antara layanan publik belum optimal	Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani	Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pembangunan
	Akses pelayanan publik belum memadai		
	Proses bisnis dan tata Kelola pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak efektif		
3	Angka Prevalensi penyalahgunaan narkoba, munculnya banyak NPS serta motif baru peredaran narkoba di Indonesia	Pencegahan, Pemberantasan Penyelahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Terwujudnya Masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba

Sumber : Perpres Nomor 12 Tahun 2025 Rentang RPJMN 2025-2029

Dalam RPJMN 2025–2029, isu rendahnya kepatuhan hukum diarahkan pada terwujudnya lembaga penegakan hukum yang berintegritas, profesional, transparan, dan akuntabel. Sementara isu tingginya penyalahgunaan narkoba ditangani melalui upaya holistik di semua tingkatan pemerintahan, termasuk peningkatan

pengetahuan masyarakat dan pembinaan sejak keluarga dan sekolah.

Meski bukan penegak hukum, Kecamatan Cicalengka memiliki peran penting dalam pelayanan publik, khususnya ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sesuai Peraturan Bupati Bandung Nomor 120 Tahun 2023. Fungsi ini dilaksanakan melalui Unit Satpol PP Kecamatan yang bertugas menegakkan Perda dan menjaga ketertiban.

Selain itu, kecamatan berperan strategis dalam pemberantasan narkoba dengan mengoordinasikan program nasional dan daerah, melakukan edukasi, pengawasan, pemberdayaan masyarakat, serta pengelolaan data. Upaya ini harus diintegrasikan dalam perencanaan strategis kecamatan agar tercipta masyarakat sehat, produktif, dan berdaya saing.

Dalam rangka transformasi tata kelola, Kecamatan Cicalengka juga berkewajiban memperkuat pelayanan publik yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan. Melalui harmonisasi indikator, sinkronisasi perencanaan, serta penguatan data dan pendanaan, kecamatan dapat menyelaraskan kebijakan nasional dengan kebutuhan lokal.

2.2.2 Penelaahan RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat arah kebijakan, program, serta kegiatan pembangunan selama lima tahun ke depan. RPJMD disusun dengan pendekatan holistik, tematik, integratif, dan berbasis spasial, serta berfungsi sebagai tindak lanjut dari evaluasi RPJMD sebelumnya.

Sebagai instrumen pembangunan daerah, RPJMD memiliki peran penting dalam mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan daerah agar lebih terukur, efektif, akuntabel, serta tetap memperhatikan prinsip otonomi daerah, potensi wilayah, dan kearifan lokal.

Visi pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera (BEDAS), Maju, dan Berkelanjutan menuju Indonesia Emas.”

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan lima misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, kompetitif, berakhlak, serta memperkuat kesetaraan gender dan perlindungan anak.
2. Mendorong pembangunan ekonomi inklusif dan ketahanan pangan berbasis produksi lokal yang berkelanjutan.
3. Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi.
5. Menjaga stabilitas ketentraman dan ketertiban umum

Sebagai salah satu perangkat daerah, Kecamatan Cicalengka memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian misi tersebut, khususnya pada misi nomor 3, yaitu mengoptimalkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, Selaras dengan RPJMD Kabupaten Bandung, urutan prioritas Tantangan Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan Cicalengka adalah sebagai berikut:

1. Reformasi birokrasi yang masih butuh peningkatan dalam rangka menghadapi dynamic government
2. Implementasi SPBE yang belum sepenuhnya stabil, dengan masih adanya tantangan dalam integrasi sistem digital pemerintahan
3. Kualitas pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan, baik dari segi transparansi, akuntabilitas, maupun partisipasi masyarakat

Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Bandung 2025–2029 menjadi pedoman utama bagi Kecamatan Cicalengka dalam merumuskan strategi dan program pembangunan yang efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

2.2.3 Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2024–2044 dijelaskan bahwa Penataan Ruang Kabupaten Bandung adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten di wilayah yang menjadi kewenangan Kabupaten, dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bandung.

Kecamatan Cicalengka sebagai salah satu Wilayah yang termasuk dalam lingkup wilayah Kabupaten bandung dalam menentukan Rencana Stategis sangat memperhatikan Rencana Tata Ruang Kabupaten Bandung sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah tersebut diatas.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wiyah yang berkaitan dengan Wilayah Kecamatan Cicalengka adalah sebagai berikut:

1. Wilayah Kecamatan Cicalengka Termasuk dalam Kawasan Bandung Selatan (KBS)
2. Cicalengka termasuk dalam Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Bandung Raya
3. Wilayah Kecamatan Cicalengka berfungsi sebagai Kawasan pertanian, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan pertahanan dan keamanan.
4. erkait Sistem Jaringan Prasarana, Kecamatan Cicalengka termasuk ke dalam sistem jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan tlekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya berupa SPAM, sistem jaringan persampahan dan sistem drainase
5. Cicalengka termasuk kawasan hutan lindung dan kawasan taman buru serta pengembangan kawasan ternak besar, ternak unggas, budi daya pembesaran ikan dan pengembangan kawasan pariwisata

Membaca Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung 2024-2044, untuk wilayah Cicalengka sangat memungkinkan

menjadi sebuah wilayah berkembang yang berada di wilayah perbatasan Kabupaten bandung dengan Kabupaten Garut.

Posisi Kecamatan Cicalengka sebagai salah satu wilayah yang termasuk PKN Bandung Raya pada dasarnya dapat memberikan manfaat besar terutama di bidang aksesibilitas, ekonomi, dan daya tarik wilayah, namun perlu diantisipasi dampak negatifnya seperti kemacetan saat proyek, polusi, alih fungsi lahan, pergeseran ekonomi lokal serta masalah konflik sosial pada saat pembebasan lahan.

2.2.4 Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Kecamatan Cicalengka

Berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Rencana Tata Ruang, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrumen penting untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan program pembangunan wilayah.

Dalam konteks Kecamatan Cicalengka, KLHS Kabupaten Bandung memberikan arahan strategis agar setiap program dan layanan perangkat daerah mempertimbangkan kelestarian lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, serta mitigasi risiko bencana. Muatan KLHS RPJMD tahun 2025-2029 terfokus pada 9 isu PB strategi dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 2.14
Isu Strategis KLHS RPJMD Kabuaten Bandung

No	Isu PB Prioritas Berdasarkan 203 Indikator	TPB yang mendukung Isu PB
1	Rendahnya kualitas SDM (sumber daya manusia) mengakibatkan rendahnya kualitas hidup Masyarakat	TPB 4
2	Belum optimalnya tata kelola pemerintah akibat kurangnya keselarasan program antar OPD	TPB 16
3	Belum optimalnya penanganan tanggap darurat bencana	TPB 1

Sumber : KLHS RPJMD, 2025

Dengan mengintegrasikan hasil KLHS ke dalam Renstra Kecamatan Cicalengka, pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik, tetapi juga memastikan keberlanjutan lingkungan. Hal ini diharapkan menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian ekosistem secara berkelanjutan.

2.2.5 Permasalahan pelayanan Kecamatan Cicalengka

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung yang berkaitan dengan Tugas Umum Pemerintahan dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Cicalengka, yaitu permasalahan pada Tatanan Kebijakan, Implementasi Program Kegiatan dan Teknis Operasional.

1. Pada Tatanan Kebijakan Pemerintah Kecamatan Cicalengka dapat diidentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintahan Kecamatan Cicalengka sebagai berikut :
    a. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik pada Perangkat Daerah (PD).
    b. Belum optimalnya Penilaian Kinerja SDM yang ada di Kecamatan.
    c. Belum optimalnya opini keuangan Perangkat Daerah (PD),dengan penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).
2. Pada tingkat Implementasi Program dan Kegiatan pada Bagian/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintahan Kecamatan Cicalengka dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan, sebagai berikut :
    a. Belum optimalnya Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN).
    b. Belum optimalnya ketepatan waktu pelayanan Adminduk sesuai dengan maklumat pelayanan.
    c. Belum optimalnya Perencanaan Strategis tingkat Perangkat Daerah (PD).
    d. Belum optimalnya realisasi program dan kegiatan pembangunan fisik dan non fisik hasil Musrenbang Kecamatan.

e. Belum optimalnya pelaksanaan tertib administrasi desa.
f. Belum optimalnya tingkat partisifasi lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan.

3. Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Sekretariat, sebagai berikut :
   a. Kurangnya SDM Kecamatan yang memahami perencanaan program.
   b. Masih belum optimalnya pelaporan kecamatan tentang realisasi program dan kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung.
   c. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Cicalengka sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dalam melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah adalah faktor internal dan eksternal kecamatan Cicalengka. Masalah internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung antara lain:

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
2. Masih lemahnya pemahaman tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efasien.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung adalah :

1. Pelimpahan kewenangan kepada camat tidak sepenuhnya didukung oleh pembinaan dari dinas teknis serta dukungan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D).
2. Kurangnya SDM ditingkat Kecamatan

Tabel 2.15
Tabel Permasalahan Pelayanan Kecamatan Cicalengka

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kualitas pelayanan publik pada perangkat daerah belum optimal.	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan di kecamatan.	1. Peraturan/regulasi yang berubah-ubah 2. Rendahnya kualitas SDM Kecamatan dan atau Masyarakat
2	Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) belum optimal	Daya dukung sarana dan prasarana mengalami penyusutan/kerusakan	Belum adanya pemeliharaan yang optimal maupun perbaikan terhadap penunjang kegiatan PATEN (ruangan layanan, hardware/software)
4	Perencanaan strategis perangkat daerah belum maksimal	Perencanaan program belum berbasis data dan analisis kebutuhan	1. Kekurangan SDM yang memahami perencanaan program 2. Data pendukung perencanaan kurang akurat/terbarui
5	Realisasi program dan kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan belum optimal	Hasil Musrenbang tidak sepenuhnya terakomodir dalam RKPD	1. Keterbatasan anggaran 2. Skala prioritas pembangunan berbeda antara masyarakat dan pemerintah daerah
6	Partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan masih rendah.	Lembaga masyarakat kurang aktif dalam perencanaan/pengawasan pembangunan	1. Minimnya sosialisasi dan fasilitasi dari pemerintah kecamatan 2. Kapasitas organisasi masyarakat masih terbatas
7	Tata kelola pemerintahan desa masih rendah (perencanaan & pengelolaan keuangan desa)	Kapasitas dan efektivitas perencanaan dan pengelolaan keuangan belum optimal	Kapasitas SDM aparatur desa perlu ditingkatkan (perencanaan, administrasi, akuntabilitas)
8	Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan masih terbatas	Sistem pelayanan berbasis IT belum berjalan optimal	1. Infrastruktur jaringan internet terbatas 2. SDM belum terbiasa menggunakan aplikasi digital 3. Anggaran untuk pengembangan IT terbatas
9	Tingginya Angka Stunting	Adanya perbedaan data dari Kader, Posyandu, Bidan, dan Puskesmas	1. Kader posyandu kurang terampil dalam pengukuran 2. Kurangnya koordinasi dan integrasi data lintas sektor 3. Kesadaran gizi masyarakat masih rendah
10	Masih adanya masyarakat miskin ekstrem (3 desa P3KE di Kec. Cicalengka)	Data penerima bantuan kadang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan	1. Validasi dan verifikasi data kurang optimal 2. Perubahan kondisi sosial-ekonomi masyarakat tidak ter-update cepat 3. Koordinasi antar instansi belum sinkron
11	Pengelolaan Wisata Alam masih kurang	Wisata Alam yang ada cenderung mengganggu lingkungan hidup	1. Kurangnya pengetahuan aparat serta warga tentang pengelolaan wisata alam 2. Belum adanya regulasi/pedoman teknis pengelolaan wisata berkelanjutan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			3. Minimnya fasilitas penunjang wisata yang ramah lingkungan

Sumber : Hasil analisis Kecamatan Cicalengka, 2025

2.2.6 Isu Strategis

Isu strategis PD (Perangkat Daerah) adalah masalah atau kondisi krusial yang perlu mendapat perhatian khusus dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan. Isu strategis ini bisa berupa masalah yang menghambat kemajuan daerah, atau peluang yang jika dimanfaatkan dengan baik, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Teknik menyimpulkan isu strategis melibatkan identifikasi, analisis, dan perumusan masalah atau kondisi yang memiliki dampak signifikan terhadap suatu organisasi atau daerah, serta memerlukan perhatian dan prioritas dalam perencanaan. Penyimpulan ini penting untuk menentukan arah kebijakan dan tindakan strategis ke depan.

Merumuskan isu strategis daerah (dapat menggunakan kertas kerja) disimpulkan dari:

1. permasalahan;
2. isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional); dan
3. potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Tabel 2.16
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Cicalengka

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Peraturan/regulasi yang berubah-ubah Rendahnya kualitas SDM Kecamatan dan atau Masyarakat	Tata Kelola Pemerintahan	Demografi Penduduk Dunia	Akses Teknologi Informasi yang tidak merata	Keterbatasan wewenang kecamatan	Pelayanan Publik masih belum optimal
Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa	Kurangnya SDM yang memahami tentang tata kerlola administrasi dan keuangan desa	Tata Kelola Pemerintahan Desa	Isu Good Governance global	Banyaknya penyelewengan Dana Desa	Kurangnya pengawasan internal dan eksternal	Kualitas Pemerintahan Desa masih belum optimal
Wisata Alam	Kurangnya Pengetahuan aparat serta warga tentang pengelolaan wisata alam	Wisata Alam yang ada cenderung mengganggu lingkungan hidup	Iklim Global	Potensi bencana alam yang tinggi	Potensi bencana alam yang tinggi	Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana alam

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Tingginya Angka Stunting	Kader Posyandu kurang terampil dalam pengukuran Adanya perbedaan data dari Kader, Posyandu, Bidan, dan Puskesmas	Kurangnya pengetahuan warga tentang dapur hidup	Tantangan kesehatan global (gizi buruk, malnutrisi)	Persoalan Kesehatan masyarakat	Tingginya prevalensi stunting di Kabupaten Bandung	Masih Tingginya prevelensi stunting pada anak-anak
Kecamatan Cicalengka terdiri dari 12 Desa, 3 desa diantaranya merupakandesa P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)	Data Penerima Bantuan kadang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan	Pemanfaatan halaman rumah yang kurang maksimal	Tingginya angka kemiskinan global	Tingginya angka kemiskinan	Data keluarga miskin belum sesuai	Masih adanya masyarakat yang miskin Ekstrim

Sumber : Hasil analisis Kecamatan Cicalengka, 2025

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

3.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Cicalengka Tahun 2025-2029 akan fokus dalam Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan dapat dicapai melalui beberapa cara, termasuk penerapan loket layanan terpadu, penjadwalan hari pelayanan khusus, peningkatan kualitas dan disiplin pegawai, serta penggunaan teknologi informasi.

Berikut adalah beberapa poin penting terkait peningkatan kualitas pelayanan publik di kecamatan:

1. Loket Layanan Terpadu:
   Menggabungkan berbagai jenis layanan, seperti kependudukan, perizinan, dan sosial, dalam satu tempat untuk kemudahan masyarakat.
2. Pelayanan Khusus:
   Menyediakan waktu khusus untuk kelompok rentan seperti lansia atau penyandang disabilitas agar mereka dapat dilayani dengan lebih baik.
3. Peningkatan Kualitas dan Disiplin Pegawai:
   a) Menekankan pentingnya kedisiplinan waktu kerja pegawai dan memberikan sanksi bagi yang melanggar.
   b) Meningkatkan kompetensi pegawai melalui pelatihan dan pendidikan.
4. Penggunaan Teknologi Informasi:
   a) Menerapkan sistem informasi dan teknologi untuk mempercepat proses pelayanan dan meningkatkan efisiensi.
   b) Mempermudah akses informasi dan layanan melalui website atau aplikasi.

5. Asas Pelayanan Publik yang Baik:
   Memastikan pelayanan dilakukan dengan memperhatikan asas-asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesionalitas, partisipatif, persamaan perlakuan, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, serta ketepatan waktu.
6. Evaluasi dan Umpan Balik:
   a) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kualitas pelayanan untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.
   b) Menyediakan wadah bagi masyarakat untuk memberikan umpan balik dan saran terkait pelayanan.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan kualitas pelayanan publik di kecamatan dapat terus meningkat, memberikan manfaat yang lebih baik bagi masyarakat.

3.1.2 Sasaran

Sasaran Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Tujuan Renstra pada dasarnya bersifat umum dan menggambarkan arah strategis yang ingin dicapai oleh organisasi dalam jangka menengah, sedangkan sasaran merupakan penjabaran yang lebih spesifik, terukur, dan dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan. Sebagai contoh, tujuan dapat dirumuskan dalam bentuk “meningkatkan kesejahteraan masyarakat”, sementara sasarannya lebih terukur seperti “meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat sebesar 10% dalam kurun waktu lima tahun”. Dengan demikian, hubungan antara tujuan dan sasaran bersifat hierarkis di mana tujuan memberikan arah pembangunan secara makro, sedangkan sasaran menguraikan langkah konkret yang dapat dievaluasi secara objektif.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan di Kecamatan, ditetapkan sasaran strategis yang ingin dicapai, yaitu meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan.

Tabel 3.1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Cicalengka

Nspk Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	0,19	0,22	0,25	0,27	0,28	0,29	Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)	88,67	88,86	89,09	89,33	89,58	89,84	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat sesuai PermenPAN RI Nomor 14 Tahun 2017

Sumber : Hasil analisis Kecamatan Cicalengka, 2025

3.2 Strategi Kecamatan Cicalengka dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Cicalengka Tahun 2025-2029

Renstra Kecamatan Cicalengka 2025-2029 dirancang dengan pendekatan bertahap untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pentahapan ini bertujuan untuk memastikan implementasi program dan kegiatan yang terukur, berkelanjutan, dan memberikan dampak optimal bagi pengembangan sumber daya manusia aparatur. Berikut adalah pentahapan Renstra Kecamatan Cicalengka 2025-2029:

Tahap I : Penguatan Fondasi (2025–2026)

Fokus pada penguatan administrasi, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta pelayanan publik yang prima. Aparatur dituntut

profesional, adaptif, dan inovatif. Optimalisasi pengawasan internal melalui SPIP serta penerapan manajemen risiko.

Tahap II : Penguatan Kelembagaan (2027–2028)

Membangun kelembagaan yang solid melalui pembagian tugas sesuai tupoksi, penyusunan SOP pelayanan, peningkatan tata kelola administrasi dan keuangan, serta pengembangan sistem informasi Kecamatan. Diharapkan terwujud lembaga yang kuat, efektif, efisien, responsif, dan mendukung perencanaan pembangunan berkualitas.

Tahap III : Akselerasi dan Optimalisasi (2028–2029

Meningkatkan peran camat secara atributif dan delegatif melalui koordinasi lintas instansi, forum Kecamatan, serta pembinaan dan pengawasan desa. Mendorong kerja sama lintas sektor guna mewujudkan ketertiban umum, penanggulangan masalah lingkungan (khususnya persampahan), serta mendukung pengembangan ekonomi lokal.

Tahap IV : Transformasi dan Ekspansi (2029–2030)

Mendorong transformasi layanan publik berbasis elektronik dengan dukungan sarana-prasarana memadai. Aparatur dituntut lebih responsif, kreatif, dan inovatif dalam memberikan pelayanan dan mendukung pembangunan wilayah.

Tahap V : Pemantapan (2030)

Mewujudkan Kecamatan Cicalengka yang Bedas, Maju, dan Berkelanjutan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang modern, serta pembangunan daerah yang berdaya saing. Aparatur berperan sebagai agen perubahan yang adaptif, inovatif, dan berkontribusi nyata bagi kemajuan Kabupaten Bandung.

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Kecamatan Cicalengka

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP III (2029)	TAHAP IV (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan SDM aparatur kecamatan, sarana dan prasarana serta mekanisme pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat	Peningkatan SDM aparatur kecamatan, sarana dan prasarana pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat serta membangun pelayanan berbasis digital	Peningkatan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat melalui peningkatan pelayanan berbasis digital	Peningkatan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat melalui penerapan pelayanan berbasis digital	Peningkatan pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat yang berkelanjutan
Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan melalui pemetaan permasalahan dan potensi lokal	Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dengan mendorong inovasi berdasarkan hasil pemetaan permasalahan dan potensi lokal	Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan berbasis potensi lokal melalui peningkatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor	Penguatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan berbasis potensi lokal melalui peningkatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor	Penguatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan berbasis potensi lokal melalui peningkatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan

Sumber : Hasil Analisis Kecamatan Cicalengka, 2025

3.3 Arah Kebijakan Kecamatan Cicalengka dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Cicalengka Tahun 2025-2029

Strategi dan kebijakan Kecamatan Cicalengka Dalam rangka pencapaian visi dan misi secara efektif dan efisien, dianalisis faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya dengan memperhitungkan nilai–nilai yang berkembang dalam Internal organisasi serta situasi dan kondisi ekternal di lingkungan Kecamatan Cicalengka antara lain:

Tabel 3.3
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Cicalengka

No	Sasaran RPJMD yang Relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5
1	Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif, dan Efisien	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan berbasis potensi lokal	Peningkatan pelayanan publik yang responsif, adaptif, transparan, akuntabel dan berbasis digital berorientasi pada kepuasan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan	

Sumber : Hasil Analisis Kecamatan Cicalengka, 2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan, Sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program dan Kegiatan pada Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung yang disusun untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bandung, perencanaan program dan kegiatan ini sesuai alur atau mekanisme perencanaan mulai dari persiapan hingga penetapan skala prioritas. Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Icalengka selama 5 tahun ke depan (2025 - 2029) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kabupaten bandung, Untuk selanjutnya pencapaian Target Kinerja Kecamatan Icalengka akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Bandung selama 5 tahun kedepan.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Program adalah rangkaian kegiatan terencana dan saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu sesuai tugas dan fungsi pemerintah. Dalam konteks pembangunan, program merupakan unit besar perencanaan yang terdiri atas beberapa kegiatan. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, program merupakan penjabaran kebijakan yang memuat satu atau lebih kegiatan untuk mencapai sasaran, tujuan, dan hasil tertentu.

Tabel 4.1
Teknik Merumskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Cicalengka

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya.
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Hasil Survey Kepuasan Masyarakat sesuai PermenPAN RI Nomor 14 Tahun 2017
			Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Hasil Maturitas Manajemen Risiko (MR) Perangkat Daerah
				Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil evaluasi implementasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten Bandung
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
				Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi keuangan yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang harus disusun x 100%
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang harus disusun x 100%
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan
				Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang harus disusun x 100%

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD yang telah disusun / Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD yang harus disusun x 100%
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik / Jumlah Aset Barang Milik Daerah x 100%

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya kapasitas kelembagaan kecamatan dalam mengelola urusan pemerintahan umum sebagai perpanjangan tangan Kepala Daerah		Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan : Jumlah urusan pemerintahan yang direncanakan x 100%
				Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terselenggaranya kegiatan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain di kecamatan	Persentase pelaksanaan urusan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain di kecamatan / jumlah kegiatan yang direncanakan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain di kecamatan x 100%
				Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0002 - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
				Terselenggaranya koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang terlaksana / jumlah koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang direncanakan x 100%

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi denganPerangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi denganPerangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
				Terlaksananya Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum dengan Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	7.01.02.2.03.0002 - Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta
				Terselenggaranya urusan pelimpahan kepada camat	Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana / Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya kapasitas dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina / Jumlah Keseluruhan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan x 100%
				Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana / Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang direncanakan x 100%
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Forum Musyawarah dalam Forum Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
				Terselenggaranya fasilitasi dan pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi dan Dibina / Jumlah fasilitasi dan pembinaan Lembaga kemasyarakatan yang direncanakan x 100%
				Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	7.01.03.2.03.0003 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan
				Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	7.01.03.2.03.0005 - Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
				Terselenggaranya fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Persentase fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang dilaksanakan / Jumlah fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
				Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	7.01.03.2.06.0005 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	7.01.03.2.06.0006 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
				Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
				Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
				Terlaksananya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	7.01.03.2.06.0011 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya efektivitas koordinasi dalam penegakan Peraturan Daerah guna mewujudkan kondisi masyarakat yang tenteram dan tertib		Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah koordinasi penegakkan perda yang berkaitan dengan Trantibum di Kecamatan / Jumlah koordinasi penegakkan perda yang direncanakan berkaitan dengan Trantibum di Kecamatan x 100%
				Terselenggaranya koordinasi dan pembinaan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Koordinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koodinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana / Jumlah Koodinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
				Terselenggaranya koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dilaksanakan / Jumlah koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya efektivitas koordinasi kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kerja kecamatan		Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan / Jumlah koordinasi urusan pemerintahan umum yang direncanakan x 100%
				Terselenggaranya kegiatan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.05.2.01- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah / Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
				Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
			Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang berkesinambungan di wilayah kecamatan		Persentase pembinaan monitoring dan evaluasi pemerintahan desa	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan monev pada pemerintahan desa / Jumlah perencanaan pembinaan dan monev pada pemerintahan desa
				Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan desa	Persentase desa yang dibina dan diawasi	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina dan diawasi / Total jumlah desa x 100%

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
				Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7.01.06.2.01.0009 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Cicalengka, 2025

Tabel 4.2
Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KET.
			2026		2027		2028		2029		2030						
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					(14)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	76,26	60 Poin	4.843.345.000,00	60.50 Poin	4.609.945.000,00	61 Poin	4.609.945.000,00	61.50 Poin	4.609.945.000,00	62 Poin	4.609.945.000,00					S.3.1
	Indeks Manajemen Risiko																
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu		100 %	10.100.000,00	100 %	7.100.000,00	100 %	7.100.000,00	100 %	7.100.000,00	100 %	7.100.000,00					
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	8 dokumen	2.100.000,00	8 dokumen	2.100.000,00	8 dokumen	2.100.000,00	8 dokumen	2.100.000,00	8 dokumen	2.100.000,00					
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 dokumen	4 dokumen	1.500.000,00	4 dokumen	750.000,00	4 dokumen	750.000,00	4 dokumen	750.000,00	4 dokumen	750.000,00					
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 dokumen	4 dokumen	1.500.000,00	4 dokumen	750.000,00	4 dokumen	750.000,00	4 dokumen	750.000,00	4 dokumen	750.000,00					
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 dokumen	4 dokumen	1.500.000,00	4 dokumen	750.000,00	4 dokumen	750.000,00	4 dokumen	750.000,00	4 dokumen	750.000,00					
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 dokumen	4 dokumen	1.500.000,00	4 dokumen	750.000,00	4 dokumen	750.000,00	4 dokumen	750.000,00	4 dokumen	750.000,00					
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		1 dokumen	1.000.000,00	1 dokumen	1.000.000,00	1 dokumen	1.000.000,00	1 dokumen	1.000.000,00	1 dokumen	1.000.000,00					
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		12 data	1.000.000,00	12 data	1.000.000,00	12 data	1.000.000,00	12 data	1.000.000,00	12 data	1.000.000,00					
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Anggaran/Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100%		4.152.028.000,00		4.156.628.000,00		4.156.628.000,00		4.156.628.000,00		4.156.628.000,00					
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 ob	20 ob	4.146.028.000,00	20 ob	4.146.028.000,00	20 ob	4.146.028.000,00	20 ob	4.146.028.000,00	20 ob	4.146.028.000,00					
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 dokumen	4 dokumen	1.500.000,00	4 dokumen	2.150.000,00	4 dokumen	2.150.000,00	4 dokumen	2.150.000,00	4 dokumen	2.150.000,00					

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KET.
			2026			2027			2028			2029			2030			
			TARGET		PAGU	TARGET		PAGU	TARGET		PAGU	TARGET		PAGU	TARGET		PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)		(7)	(8)		(9)	(10)		(11)	(12)		(13)	(14)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	1	dokumen	1.500.000,00	1	dokumen	2.150.000,00	1	dokumen	2.150.000,00	1	dokumen	2.150.000,00	1	dokumen	2.150.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 laporan	2	laporan	1.500.000,00	2	laporan	3.150.000,00	2	laporan	3.150.000,00	2	laporan	3.150.000,00	2	laporan	3.150.000,00	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1	dokumen	1.500.000,00	1	dokumen	3.150.000,00	1	dokumen	3.150.000,00	1	dokumen	3.150.000,00	1	dokumen	3.150.000,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100%			10.000.000,00			10.000.000,00			10.000.000,00			10.000.000,00			10.000.000,00	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 orang	40	orang	10.000.000,00	40	orang	10.000.000,00	40	orang	10.000.000,00	40	orang	10.000.000,00	40	orang	10.000.000,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%			140.665.000,00			105.665.000,00			105.665.000,00			105.665.000,00			105.665.000,00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 jenis	7	jenis	2.500.000,00	7	jenis	2.500.000,00	7	jenis	2.500.000,00	7	jenis	2.500.000,00	7	jenis	2.500.000,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 paket	24	paket	44.509.000,00	24	paket	35.509.000,00	24	paket	35.509.000,00	24	paket	35.509.000,00	24	paket	35.509.000,00	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	13 paket	13	paket	8.000.000,00	13	paket	8.000.000,00	13	paket	8.000.000,00	13	paket	8.000.000,00	13	paket	8.000.000,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	3	paket	54.075.000,00	3	paket	34.075.000,00	3	paket	34.075.000,00	3	paket	34.075.000,00	3	paket	34.075.000,00	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	3	paket	2.605.000,00	3	paket	1.605.000,00	3	paket	1.605.000,00	3	paket	1.605.000,00	3	paket	1.605.000,00	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	2	dokumen	22.976.000,00	2	dokumen	22.976.000,00	2	dokumen	22.976.000,00	2	dokumen	22.976.000,00	2	dokumen	22.976.000,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1	laporan	6.000.000,00	1	laporan	1.000.000,00	1	laporan	1.000.000,00	1	laporan	1.000.000,00	1	laporan	1.000.000,00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%			-			-			-			-			-	
Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang tersedia			unit	-		unit	-		unit	-		unit	-		unit	-	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit		unit	-		unit	-		unit	-		unit	-		unit	-	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KET.
			2026		2027		2028		2029		2030						
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					(14)
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	-	unit	-	unit	-	unit	-	unit	-	unit	-					
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	unit	-	unit	-	unit	-	unit	-	unit	-					
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		264.000.000,00		264.000.000,00		264.000.000,00		264.000.000,00		264.000.000,00					
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	30.000.000,00	1 laporan	30.000.000,00	1 laporan	30.000.000,00	1 laporan	30.000.000,00	1 laporan	30.000.000,00					
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	234.000.000,00	1 laporan	234.000.000,00	1 laporan	234.000.000,00	1 laporan	234.000.000,00	1 laporan	234.000.000,00					
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	100%		266.552.000,00		66.552.000,00		66.552.000,00		66.552.000,00		66.552.000,00					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 unit	6 unit	42.200.000,00	6 unit	42.200.000,00	6 unit	42.200.000,00	6 unit	42.200.000,00	6 unit	42.200.000,00					
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		unit	-	unit	-	unit	-	unit	-	unit	-					
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 unit	4 unit	6.000.000,00	4 unit	6.000.000,00	4 unit	6.000.000,00	4 unit	6.000.000,00	4 unit	6.000.000,00					
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	218.352.000,00	1 unit	18.352.000,00	1 unit	18.352.000,00	1 unit	18.352.000,00	1 unit	18.352.000,00					
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	unit	-	unit	-	unit	-	unit	-	unit	-					
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM	88,50	88.86	237.772.261,00	89.08	Poin 199.738.000,00	89.32	Poin 199.738.000,00	89.58	Poin 199.738.000,00	89.86	Poin 199.738.000,00					S.3.1
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat	100%	100 %	5.000.000,00	100 %	5.000.000,00	100 %	5.000.000,00	100 %	5.000.000,00	100 %	5.000.000,00					
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 laporan	1 laporan	5.000.000,00	1 laporan	5.000.000,00	1 laporan	5.000.000,00	1 laporan	5.000.000,00	1 laporan	5.000.000,00					
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak	100%		19.022.261,00		6.958.000,00		6.958.000,00		6.958.000,00		6.958.000,00					

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KET.
			2026			2027			2028			2029			2030			
			TARGET		PAGU	TARGET		PAGU	TARGET		PAGU	TARGET		PAGU	TARGET		PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)		(7)	(8)		(9)	(10)		(11)	(12)		(13)	(14)
Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan																
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1	laporan	6.500.000,00	1	laporan	2.958.000,00	1	laporan	2.958.000,00	1	laporan	2.958.000,00	1	laporan	2.958.000,00	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1	laporan	12.522.261,00	1	laporan	4.000.000,00	1	laporan	4.000.000,00	1	laporan	4.000.000,00	1	laporan	4.000.000,00	
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%			13.750.000,00			4.000.000,00			4.000.000,00			4.000.000,00			4.000.000,00	
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 laporan		laporan	6.000.000,00		laporan	2.000.000,00		laporan	2.000.000,00		laporan	2.000.000,00		laporan	2.000.000,00	
Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	-	1	sarana	7.750.000,00	1	sarana	2.000.000,00	1	sarana	2.000.000,00	1	sarana	2.000.000,00	1	sarana	2.000.000,00	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%			200.000.000,00			183.780.000,00			183.780.000,00			183.780.000,00			183.780.000,00	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 laporan	3	laporan	200.000.000,00	3	laporan	183.780.000,00	3	laporan	183.780.000,00	3	laporan	183.780.000,00	3	laporan	183.780.000,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina	6			339.450.000,00			112.204.000,00			112.204.000,00			112.204.000,00			112.204.000,00	S.3.1
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%			135.000.000,00			45.054.000,00			45.054.000,00			45.054.000,00			45.054.000,00	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 lembaga kemasyarakatan	4	lembaga kemasyarakatan	15.000.000,00	4	lembaga kemasyarakatan	5.000.000,00	4	lembaga kemasyarakatan	5.000.000,00	4	lembaga kemasyarakatan	5.000.000,00	4	lembaga kemasyarakatan	5.000.000,00	
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 dokumen	1	dokumen	20.000.000,00	1	dokumen	5.000.000,00	1	dokumen	5.000.000,00	1	dokumen	5.000.000,00	1	dokumen	5.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN															KET.
			2026			2027			2028			2029			2030			
			TARGET		PAGU	TARGET		PAGU	TARGET		PAGU	TARGET		PAGU	TARGET		PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)		(7)	(8)		(9)	(10)		(11)	(12)		(13)	(14)
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1	laporan	100.000.000,00	1	laporan	35.054.000,00	1	laporan	35.054.000,00	1	laporan	35.054.000,00	1	laporan	35.054.000,00	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase desa yang menerapkan Administrasi Pemerintahan Desa berdasarkan peraturan	100%			74.450.000,00			60.750.000,00			60.750.000,00			60.750.000,00			60.750.000,00	
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 lembaga kemasyarakatan	4	lembaga kemasyarakatan	50.000.000,00	4	lembaga kemasyarakatan	50.000.000,00	4	lembaga kemasyarakatan	50.000.000,00	4	lembaga kemasyarakatan	50.000.000,00	4	lembaga kemasyarakatan	50.000.000,00	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	2 unit	2	unit	750.000,00	2	unit	750.000,00	2	unit	750.000,00	2	unit	750.000,00	2	unit	750.000,00	
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 laporan	1	laporan	15.000.000,00	1	laporan	5.000.000,00	1	laporan	5.000.000,00	1	laporan	5.000.000,00	1	laporan	5.000.000,00	
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 laporan	1	laporan	8.700.000,00	1	laporan	5.000.000,00	1	laporan	5.000.000,00	1	laporan	5.000.000,00	1	laporan	5.000.000,00	
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%			130.000.000,00			6.400.000,00			6.400.000,00			6.400.000,00			6.400.000,00	
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		50	keluarga	20.000.000,00	50	keluarga	3.000.000,00	50	keluarga	3.000.000,00	50	keluarga	3.000.000,00	50	keluarga	3.000.000,00	
Peningkatan kesadaran Keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran Keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah		15	keluarga	20.000.000,00	15	keluarga	3.000.000,00	15	keluarga	3.000.000,00	15	keluarga	3.000.000,00	15	keluarga	3.000.000,00	
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		50	keluarga	30.000.000,00	50	keluarga	100.000,00	50	keluarga	100.000,00	50	keluarga	100.000,00	50	keluarga	100.000,00	
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkuangan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkuangan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat		15	keluarga	20.000.000,00	15	keluarga	100.000,00	15	keluarga	100.000,00	15	keluarga	100.000,00	15	keluarga	100.000,00	
Pelatihan keluarga tanggap bencana alam	Jumlah keluarga yang mengikuti Pelatihan keluarga tanggap bencana alam		15	keluarga	20.000.000,00	15	keluarga	100.000,00	15	keluarga	100.000,00	15	keluarga	100.000,00	15	keluarga	100.000,00	
Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga		15	keluarga	20.000.000,00	15	keluarga	100.000,00	15	keluarga	100.000,00	15	keluarga	100.000,00	15	keluarga	100.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN															KET.
			2026			2027			2028			2029			2030			
			TARGET		PAGU	TARGET		PAGU	TARGET		PAGU	TARGET		PAGU	TARGET		PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)		(7)	(8)		(9)	(10)		(11)	(12)		(13)	(14)
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum		100	%	66.912.000,00	100	%	66.912.000,00	100	%	66.912.000,00	100	%	66.912.000,00	100	%	66.912.000,00	S.3.1
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%			46.000.000,00			46.000.000,00			46.000.000,00			46.000.000,00			46.000.000,00	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 laporan	2	laporan	23.000.000,00	2	laporan	23.000.000,00	2	laporan	23.000.000,00	2	laporan	23.000.000,00	2	laporan	23.000.000,00	
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 laporan	1	laporan	23.000.000,00	1	laporan	23.000.000,00	1	laporan	23.000.000,00	1	laporan	23.000.000,00	1	laporan	23.000.000,00	
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	100	%	20.912.000,00	100	%	20.912.000,00	100	%	20.912.000,00	100	%	20.912.000,00	100	%	20.912.000,00	
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 laporan	1	laporan	20.912.000,00	1	laporan	20.912.000,00	1	laporan	20.912.000,00	1	laporan	20.912.000,00	1	laporan	20.912.000,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		100	%	82.308.000,00	100	%	82.308.000,00	100	%	82.308.000,00	100	%	82.308.000,00	100	%	82.308.000,00	S.3.1
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100	%	82.308.000,00	100	%	82.308.000,00	100	%	82.308.000,00	100	%	82.308.000,00	100	%	82.308.000,00	
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 orang	50	orang	30.000.000,00	50	orang	30.000.000,00	50	orang	30.000.000,00	50	orang	30.000.000,00	50	orang	30.000.000,00	
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 orang	100	orang	23.108.000,00	100	orang	23.108.000,00	100	orang	23.108.000,00	100	orang	23.108.000,00	100	orang	23.108.000,00	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 dokumen	2	dokumen	29.200.000,00	2	dokumen	29.200.000,00	2	dokumen	29.200.000,00	2	dokumen	29.200.000,00	2	dokumen	29.200.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN															KET.
			2026			2027			2028			2029			2030			
			TARGET		PAGU	TARGET		PAGU	TARGET		PAGU	TARGET		PAGU	TARGET		PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)		(7)	(8)		(9)	(10)		(11)	(12)		(13)	(14)
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa		100	%	93.238.000,00	100	%	93.238.000,00	100	%	93.238.000,00	100	%	93.238.000,00	100	%	93.238.000,00	S.3.1
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang dibina	100%	100	%	93.238.000,00	100	%	93.238.000,00	100	%	93.238.000,00	100	%	93.238.000,00	100	%	93.238.000,00	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 dokumen	12	dokumen	20.000.000,00	12	dokumen	20.000.000,00	12	dokumen	20.000.000,00	12	dokumen	20.000.000,00	12	dokumen	20.000.000,00	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	24 dokumen	24	dokumen	30.000.000,00	24	dokumen	30.000.000,00	24	dokumen	30.000.000,00	24	dokumen	30.000.000,00	24	dokumen	30.000.000,00	
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		1	dokumen		1	dokumen		1	dokumen		1	dokumen		1	dokumen		
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 dokumen	1	dokumen	43.238.000,00	1	dokumen	43.238.000,00	1	dokumen	43.238.000,00	1	dokumen	43.238.000,00	1	dokumen	43.238.000,00	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan			dokumen			dokumen			dokumen			dokumen			dokumen		
Jumlah Total					5.663.025.261,00			5.164.345.000,00			5.164.345.000,00			5.164.345.000,00			5.164.345.000,00	

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Cicalengka, 2025

Ket :

S.3.1 = Program yang Mendukung Sasaran KDH: Meningkatnya kualitas birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien

4.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Tanpa ada dukungan dari Kegiatan dan Sub Kegiatan program prioritas Pembangunan daerah tidak dapat berjalan dengan baik berikut ini daftar Sub Kegiatan prioritas yang mendukung Proggram prioritas Pembangunan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Subkegiatan	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kapasitas kelembagaan kecamatan dalam mengelola urusan pemerintahan umum sebagai perpanjangan tangan Kepala Daerah	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya kapasitas dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya efektivitas koordinasi kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kerja kecamatan	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang berkesinambungan di wilayah kecamatan	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	

Sumber : Hasil Analisis Kecamatan Cicalengka, 2025

4.3 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Cicalengka Tahun 2025-2029 melalui IKU Kecamatan Cicalengka

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat, dan dengan Indikator kinerja dapat diketahui capaian kinerja, baik kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Indikator Kinerja Kecamatan Cicalengka yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Cicalengka dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cicalengka

No	Indikator	Satuan	Target Tahunan						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1	Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	0,19	0,22	0,25	0,27	0,28	0,29	Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Cicalengka, 2025

4.4 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui IKK

Dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, pengukuran kinerja menjadi salah satu aspek yang sangat krusial. Pada Tingkat Kecamatan terdapat tantangan signifikan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terstruktur dan terstandarisasi. IKK ini menyebabkan terarahnya Tujuan Kecamatan dalam melakukan evaluasi kinerja secara obyektif, serta kemampuan untuk menilai sejauh mana program dan kegiatan Kecamatan berdampak langsung terhadap Masyarakat. Berikut ini tabel yang menjelaskan tentang Indikator kinerja kunci.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator	Satuan	Target Tahunan						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1	Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	0,19	0,22	0,25	0,27	0,28	0,29	Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Cicalengka, 2025

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kecamatan Cicalengka memiliki kedudukan, tugas pokok, dan fungsi yang strategis dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bandung. Oleh karena itu, Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cicalengka Tahun 2025–2029 merupakan dokumen penting yang berfungsi sebagai acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi pemerintahan serta pembangunan di wilayah Kecamatan Cicalengka.

Renstra ini hanya dapat terwujud apabila seluruh aparatur kecamatan memiliki komitmen kuat, dukungan masyarakat terbangun secara optimal, serta terjalin sinergi, tanggung jawab, dan pengabdian yang tinggi. Keberhasilan perencanaan strategis bukan hanya ditentukan oleh kualitas dokumennya, melainkan terutama pada konsistensi implementasinya di lapangan, yang memerlukan *political will* pimpinan organisasi.

Dengan demikian, Renstra Kecamatan Cicalengka Tahun 2025–2029 diharapkan dapat menjadi pijakan utama dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan kecamatan, sehingga seluruh program dan kegiatan dapat terarah, terukur, dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bandung.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Renstra Kecamatan Cicalengka Tahun 2025–2029 berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Dengan adanya dokumen ini, pelaksanaan pembangunan diharapkan berjalan secara sinergis, berkesinambungan, dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029.

Agar pelaksanaan Renstra berjalan efektif, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Kecamatan Cicalengka Tahun 2025–2029 telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029.
2. Renstra ini wajib menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan (Renja Kecamatan) setiap tahun, dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung.
3. Dalam mendukung penyiapan Rancangan APBD Kabupaten Bandung, Renstra Kecamatan Cicalengka harus dijadikan acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan (RKA–DPA Kecamatan).
4. Capaian pelaksanaan tahunan Renstra Tahun 2025–2029, yang dituangkan dalam dokumen Renja Kecamatan, harus dipertanggungjawabkan secara sistematis, terukur, dan sesuai peraturan perundang-undangan.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Pengendalian dan evaluasi merupakan bagian penting dalam siklus manajemen pembangunan, yang bertujuan memastikan seluruh program dan kegiatan berjalan sesuai rencana serta mencapai sasaran yang ditetapkan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Di tingkat kecamatan, pengendalian dilakukan melalui pemantauan berkala dengan indikator kinerja dan capaian output. Camat sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan bertanggung jawab memastikan bahwa setiap program dan kegiatan perangkat daerah yang dilaksanakan di wilayahnya selaras dengan target dan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Evaluasi pembangunan dilaksanakan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran dokumen perencanaan, sekaligus mengidentifikasi hambatan dan kendala. Evaluasi mencakup penilaian internal oleh kecamatan serta masukan dari pemangku kepentingan, yang hasilnya dijadikan dasar

dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahunan.

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, aparatur Kecamatan Cicalengka dituntut memiliki karakter tangguh, adaptif, inovatif, dan kreatif dalam melaksanakan tugas, fungsi, serta kewenangan. Dengan demikian, Renstra ini harus menjadi pijakan yang kokoh dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, efektif, dan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bandung secara menyeluruh.

Soreang, September 2025

CAMAT CICALENGKA

Ttd.

CUCU HIDAYAT

BUPATI BANDUNG

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan 24

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Kecamatan Cicalengka Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025 24

Tabel 2.3 Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Kecamatan Cicalengka berdasarkan Diklat Struktural/Pimpinan Tahun 2025 25

Tabel 2.4 Hasil Rekonsiliasi Aset Kecamatan Cicalengka Tahun 2024 25

Tabel 2.5 Klasifikasi Aset Berdasarkan Kondisi 27

Tabel 2.6 Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (Kib) A Tanah 27

Tabel 2.7 Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (Kib) B Peralatan dan Mesin .. 28

Tabel 2.8 Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (Kib) C Gedung dan Bangunan 31

Tabel 2.9 Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (Kib) D Jalan, Irigasi dan Jaringan 32

Tabel 2.10 Target Dan Realisasi Indikator Kinerja Kecamatan Cicalengka Tahun 2021-2024 38

Tabel 2.11 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung 42

Tabel 2.12 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung 49

Tabel 2.13 Isu Nasional, Sasaran Nasional dan Arah Kebijakan RPJMN Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi 55

Tabel 2.14 Isu Strategis KLHS RPJMD Kabuaten Bandung 59

Tabel 2.15 Tabel Permasalahan Pelayanan Kecamatan Cicalengka 62

Tabel 2.16 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Cicalengka 63

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Cicalengka 67

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Kecamatan Cicalengka 69

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Cicalengka 69

Tabel 4.1 Teknik Merumskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Cicalengka 71

Tabel 4.2 Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan..... 90

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 97

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cicalengka 98

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci 99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Cicalengka..... 23

Gambar 2.2 Grafik Target dan Realisasi Kinerja Kecamatan Cicalengka Tahun 2020-2024 39

Gambar 2.3 Grafik Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Cicalengka Tahun 2020-2024 39